



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

SKRIPSI

**ANALISIS ALASAN TIONGKOK BERTAHAN DALAM PARIS
AGREEMENT SEBAGAI NEGARA PENYUMBANG EMISI GAS
TERBESAR DI DUNIA PADA TAHUN 2017**

Disusun Oleh:

Gita Febriana Dila

17323089

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**ANALISIS ALASAN TIONGKOK BERTAHAN DALAM PARIS
AGREEMENT SEBAGAI NEGARA PENYUMBANG EMISI GAS
TERBESAR DI DUNIA PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Guna Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Disusun oleh:

Gita Febriana Dila

17323089

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS ALASAN TIONGKOK BERTAHAN DALAM PARIS AGREEMENT
SEBAGAI NEGARA PENYUMBANG EMISI GAS TERBESAR DI DUNIA PADA
TAHUN 2017**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Syarat Sebagaimana Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat

Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

14 April 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A
3. Hasbi Aswar S.IP., M.A.
4. Willi Ashadi, S.HI., M.A.

Tanda Tangan









PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gita Febriana Dila

NIM : 17323089

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Alasan Tiongkok Bertahan Dalam Paris Agreement

Sebagai Negara Penyumbang Emisi Gas Terbesar di Dunia Pada Tahun 2017.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan Tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 April 2021



Gita Febriana Dila

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas, doa, nasehat dan dukungannya yang telah diberikan selama ini

Rekan-Rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas kebersamaan, kegembiraan, serta perjuangan bersama selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTO

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyangan. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga selesai. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Penulis juga menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, doa, serta dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada saya.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc. Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terimakasih telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terimakasih telah memberikan saya banyak

saran dan masukan selama saya mengerjakan tugas akhir saya. Terimakasih sudah meluangkan waktu bapak untuk membimbing saya sampai tahap ini. Memberikan saya masukan-masukan terkait tugas akhir saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya. Tanpa bantuan dan dukungan dari bapak saya mungkin tidak bisa sampai di tahap ini. Saya memohon maaf jika selama saya menjadi mahasiswa bimbingan bapak saya melakukan kesalahan, dan memohon maaf untuk waktu yang tersita dan melelahkan dalam membimbing saya dalam proses penulisan tugas akhir. Semoga pak Zulfikar selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

6. Seluruh dosen dan staff prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan kepada saya selama saya kuliah di Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada keluarga saya, terumata ibu dan bapak saya. Terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan kepada saya sampai saya bisa duduk dibangku perkuliahan dan saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Terimakasih atas pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Terimakasih sudah selalu mendukung, memberikan yang terbaik untuk saya, tanpa ibu dan bapak saya tidak bisa sampai di titik sekarang. Terimakasih untuk ibu dan bapak sudah menjadi orang tua terbaik untuk saya. Semoga ibu dan bapak diberikan umur yang panjang, kesehatan, perlindungan oleh Allah SWT dan selalu dilancarkan rezekinya dalam setiap langkahnya.
8. Pita Rahma Dila dan Sandy Tri Gunawan, terimakasih sudah menjadi adik yang baik, yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Terimakasih sudah menjadi saudara, teman, sahabat yang selalu mendengarkan cerita dan tempat berkeluh kesah.

9. Terimakasih kepada Akmalia Sari Dewi, Putri Dwi Kurniasari, Ulfa Fauzia, Laksmita, Putri Oliviani, dan Alifia Sarsabila. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, keluarga yang sudah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya. Terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah, cerita dari saya. Terimakasih sudah memberikan saran-saran terbaik dan hiburan yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih sudah menjadi sahabat sampai saat ini dan seterusnya.
10. Terimakasih kepada Nesia Maya Mahardika, Kustya Afna Chairunnisa, Zhalika Liliandana, dan Wafda Nanda Putri sudah menjadi teman, sahabat, dan keluarga selama saya kuliah di HI UII. Terimakasih sudah banyak membantu, memberikan masukan, tempat berkeluh kesah dan memberikan hiburan. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat terbaik saya selama kuliah sampai saat ini dan seterusnya.
11. Terimakasih kepada Nadhifa Ayu Salsabila, sudah menjadi teman dan sekaligus sahabat. Terimakasih sudah melindungi seperti kakak sendiri. Terimakasih atas semangat, doa dan dukungannya. Terimakasih sudah banyak menghibur dan memberikan masukan terbaiknya. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat sampai saat ini dan seterusnya.
12. Terimakasih kepada Nanda Rizki Amaliah sudah menjadi teman dan sahabat yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungannya. Terimakasih sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah dan selalu memberi hiburan.

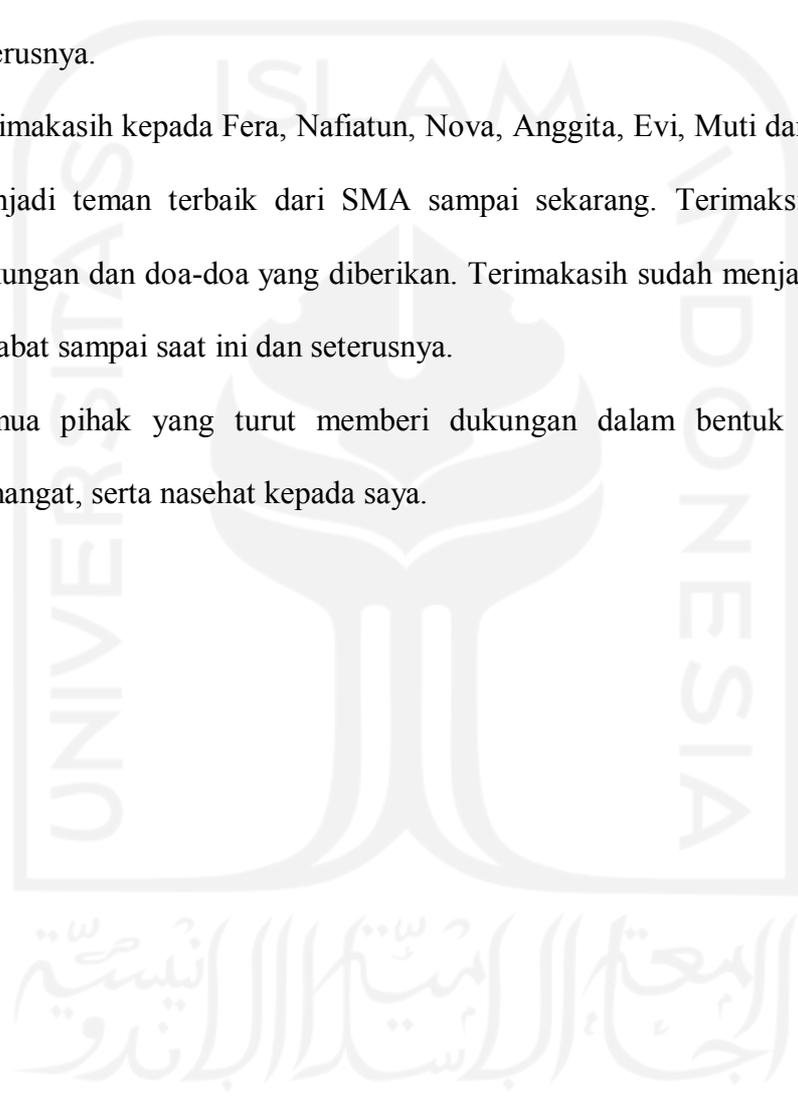
Terimakasih selalu membuat tertawa dan menghibur dengan hal-hal sederhana.

Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat sampai saat ini dan seterusnya.

13. Terimakasih kepada Tiara Ramadhanti, Alya, Jihan dan Lania yang sudah menjadi teman kost pertama saya. Terimakasih atas bantuan, kenangan dan hiburan yang diberikan. Terimakasih sudah menjadi teman sampai saat ini dan seterusnya.

14. Terimakasih kepada Fera, Nafiatun, Nova, Anggita, Evi, Muti dan Sulis sudah menjadi teman terbaik dari SMA sampai sekarang. Terimakasih semangat, dukungan dan doa-doa yang diberikan. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat sampai saat ini dan seterusnya.

15. Semua pihak yang turut memberi dukungan dalam bentuk doa, materi, semangat, serta nasehat kepada saya.



ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, Tiongkok berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya dengan bergantung pada industri besar dan kebutuhan energi yang semakin meningkat. Akibat pembangunan besar-besaran tersebut Tiongkok mengalami masalah lingkungan seperti peningkatan emisi gas karbon dan perubahan iklim. Untuk mengatasi perubahan iklim tersebut Tiongkok memutuskan untuk bergabung dengan konvensi kerangka kerja PBB yang menangani emisi karbon yaitu *Paris Agreement* dan meratifikasinya pada tahun 2015. Amerika Serikat sebagai negara dengan penyumbang emisi gas terbesar setelah Tiongkok memutuskan untuk menarik diri dari *Paris Agreement* pada tahun 2017. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis alasan Tiongkok yang tetap bertahan dalam *Paris Agreement* sebagai negara penyumbang emisi gas terbesar di dunia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri Graham Allison yang berfokus pada salah satu modelnya yaitu Rasional Aktor. Rasional Aktor sebagai bentuk kepentingan pemimpin negara dalam mengambil kebijakan luar negerinya. Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok berperan besar dalam pengambilan kebijakan untuk tetap bertahan di *Paris Agreement* sebagai salah satu kepentingannya dalam mengurangi emisi gas karbon dan mewujudkan *Chinese dream*.

Kata Kunci: *Paris Agreement*, Tiongkok, Teori Kebijakan Luar Negeri, Model Rasional Aktor

ABSTRACT

In the past years, China tried to increase the country's economic development by relying on large industries and increasing energy needs. As the result of this massive development, China is experiencing environmental problems such as increased carbon gas emissions and climate change. To overcome the climate change, China decided to join the UN framework convention dealing with carbon emissions, namely the Paris Agreement and ratified it in 2015. The United States as the country with the largest gas emission contributor after China decided to withdraw from the Paris Agreement in 2017. This Research attempts to analyze the reasons why China still insisted to stay in the Paris Agreement as the largest contributor to gas emissions in the world. In this study, the author uses Graham Allison's theory of foreign policy which focuses on one of his models, namely the Rational Actor. The rational actor is a form of the concerns of the country's leaders in taking their foreign policy. Xi Jinping as the President of China played a major role in making policies to stay in the Paris Agreement as one of his concerns in reducing carbon gas emissions and realizing the Chinese dream.

Keywords: *Paris Agreement, China, Foreign Policy Theory, Rational Actor Model*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.5 Cakupan Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	20
1.8.4 Proses Penelitian	20
BAB II	21
2.1 KIPRAH TIONGKOK DALAM PERJANJIAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL	21
2.2 PARIS AGREEMENT	27
2.3 ASPEK EMISI GAS RUMAH KACA DI TIONGKOK	35
BAB III	41
3.1 GOALS AND OBJECTIVES	42
3.1.1 TUJUAN TIONGKOK MEMPERTAHANKAN PARIS AGREEMENT	43
3.1.2 KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PARIS AGREEMENT	47
3.2 ALTERNATIVES	53
3.2.1 KERJA SAMA TIONGKOK DAN INDIA	53
3.2.2 KERJA SAMA TIONGKOK DAN UNI EROPA	58

3.2.3	KERJA SAMA TIONGKOK DAN BRAZIL.....	64
3.2.4	STRATEGI PEMBANGUNAN HIJAU DALAM KEBIJAKAN <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i> (BRI) TIONGKOK.....	67
3.3	<i>CONSEQUENCES</i>	72
3.4	<i>CHOICE</i>	80
BAB IV	88
KESIMPULAN	88
4.1	Kesimpulan.....	88
4.2	Rekomendasi.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Variabel Model Rasional Aktor dan Pengaplikasiannya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pemanasan global saat ini mulai meningkat disebabkan masuknya energi panas ke lautan. Perubahan iklim memang sudah terjadi dan suhu bumi meningkat selama beberapa abad terakhir ini. Perubahan iklim yang diakui secara resmi ditingkat internasional disusun oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. IPCC menghasilkan laporan khusus yang mengkaji isu-isu tertentu dan laporan metodologi yang memberikan panduan praktis dalam penghitungan gas rumah kaca. Laporan IPCC menegaskan bahwa aktivitas manusia sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim terutama pada 50 tahun terakhir. Apabila emisi gas rumah kaca dan pemanasan bumi terus berlanjut tanpa adanya upaya yang serius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka suhu global akan terus meningkat hingga 5 derajat. Peningkatan ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan (Purbo, Wibowo, Tobing, & dkk, 2016).

Menurut IPCC perubahan iklim telah berdampak pada ekosistem dan manusia diseluruh bagian dunia. Dengan perubahan iklim bisa menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Perubahan iklim ini menimbulkan risiko yang signifikan, tetapi juga dapat dikendalikan melalui

memanajemen risiko dengan baik sehingga dapat menghindari dampak terburuknya. Tetapi juga terdapat beberapa risiko yang memang tidak dapat dihindari seperti badai ekstrem, gelombang panas, banjir akibat curah hujan yang meningkat dan kekeringan. Peningkatan emisi gas rumah kaca diikuti oleh meningkatnya konsumsi energi dan bahan bakar fosil. Diberbagai negara sudah melakukan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi dalam hal ini yang terpenting adalah penerapannya. Walaupun kebijakan sudah diberikan bagi negara dalam mengurangi emisi, tetapi jika masih belum ada penerapannya maka emisi tidak akan berkurang (Purbo, Wibowo, Tobing, & dkk, 2016).

Masalah perubahan iklim dirasakan semakin meningkat seiring berjalannya waktu akibat emisi gas rumah kaca yang terus meningkat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Brazil pada tahun 1992 menghasilkan konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 belum pernah terjadi sebelumnya oleh PBB. Dua puluh tahun setelah konferensi lingkungan global pertama, PBB berusaha membantu pemerintah untuk menemukan cara menanggulangi masalah polusi dan sumber daya yang rusak. *Paris Agreement* merupakan hasil dari *Conference of Parties* (COP) yang ke 21 yang diselenggarakan di Paris pada 30 November-11 Desember 2015. Konferensi tersebut merupakan pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati *Agreement 2015* yang *legally binding* dan berlaku setelah tahun 2020. *Agreement* ini merupakan

puncak upaya negosiasi satu dekade terakhir untuk pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim (Chotimah , 2017).

Dengan disepakatinya *Paris Agreement, Ad-Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP)* telah menyelesaikan tugas dan dibentuk *Ad-Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA)*. Untuk mencapai kesepakatan dari 195 negara tercatat 175 telah menandatangani perjanjian tersebut dan negara yang meratifikasi *Paris Agreement* adalah negara yang juga menyumbangkan emisi gas dunia dengan harapan berupaya untuk mitigasi. Tujuan dari *Paris Agreement* untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan mencoba mempertahankan kenaikan suhu global. Kesepakatan *Paris Agreement* untuk memperkuat kemampuan negara-negara dalam menghadapi perubahan iklim dan diharapkan bisa melakukan tindakan dari kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara (Purbo, Wibowo, Tobing, & dkk, 2016).

Pada tahun 1992, Tiongkok ikut menandatangani norma internasional mengenai lingkungan hidup atau UNFCCC. Tiongkok sebagai negara berkembang sedang mencoba membangun berkembangnya industri di negaranya. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Pertumbuhan industri yang semakin kuat membuat Tiongkok menjadi dilema akan keamanan energi dan iklim. Total konsumsi energi Tiongkok berbasis batu bara dan sistem konsumsi energi, menghasilkan banyak masalah terutama pada masa emisi gas yang tinggi dan tentunya kerusakan

lingkungan. Tiongkok pada tahun 1990-an masih belum banyak memiliki wawasan mengenai dampak perubahan iklim di Tiongkok yang ditimbulkan oleh emisi akibat pembangunan di negaranya. Tiongkok masih sangat memilah-milah dalam mengikuti negosiasi internasional. Seiring berjalannya waktu, dengan mulai banyaknya penelitian ilmiah mengenai perubahan iklim, dan berbagai tinjauan iklim yang dilakukan IPCC.

Sebagai negara penghasil gas emisi terbesar Tiongkok sudah mulai menyadari bagaimana peran penting institusi internasional terutama dalam penanganan isu lingkungan. Tiongkok sudah memulai menunjukkan beberapa insentif untuk bekerja berdasarkan ketentuan yang telah dibuat dalam *Paris Agreement*. Dalam hal ini Tiongkok semakin banyak belajar dan memperhatikan norma-norma internasional, terutama pada masalah perubahan iklim yang di Tiongkok harus menyelamatkan lingkungannya akibat meningkatnya emisi yang disebabkan berbagai pembangunan industri (Chotimah , 2017). Dengan sepakatnya Tiongkok bergabung dan meratifikasi *Paris Agreement* maka Tiongkok diberikan tuntutan untuk menjadi sebagai anggota yang bertanggung jawab dan tentunya siap melakukan koordinasi mengenai kebijakan yang dilakukan Tiongkok dalam hal perubahan iklim dan penanggulangan lingkungan.

Keputusan Tiongkok untuk mempertahankan *Paris Agreement* didorong sebagai upayanya dalam mengatasi emisi gas rumah kaca. Tiongkok juga berambisi dengan melakukan kebijakan luar negeri bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki masalah lingkungan yang sama. Tiongkok bekerja sama dengan India, Uni Eropa dan Brazil. India

sebagai negara berkembang yang besar sama seperti Tiongkok dengan hampir 700 juta penduduk pedesaan yang secara langsung bergantung pada sektor sensitif iklim. Perubahan iklim yang timbul karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di India telah menjadi masalah yang serius dan menimbulkan ancaman (Balasubramanian & Birundha, 2012). Sebagai negara yang sama-sama memiliki masalah yang sama Tiongkok dan India pun melakukan kerja sama sebagai bentuk upaya mengatasi emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim juga terjadi di Uni Eropa dimana suhu udara dan curah hujan secara signifikan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida (CO₂) yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Bahkan dimulai pada Januari 2016 Eropa mengalami bulan terpanas (Talia, 2020). Hingga Uni Eropa akan berambisi untuk memperbaiki iklim hingga tahun 2030 sama halnya seperti Tiongkok. Kedua negara ini melakukan kerja sama untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus untuk kepentingan ekonomi dan politik yang memiliki kesamaan minat dan ruang yang banyak untuk kolaborasi.

Sama halnya dengan India dan Uni Eropa yang bekerja sama dengan Tiongkok dalam mengatasi perubahan iklim, Tiongkok juga bekerja sama dengan Brazil yang memiliki masalah lingkungan dan perubahan iklim yang sama. Brazil juga mengalami peningkatan suhu dalam beberapa dekade terakhir mencapai 0,5%. Masalah yang sama dengan Tiongkok, Brazil juga menyerahkan kerangka kerja nasionalnya ke UNFCCC. Ini memberikan gambaran mengenai program dan kebijakan aktif Brazil yang mengandung komponen perubahan iklim (UNDP, 2019). Melalui kepentingan yang sama

Tiongkok melakukan kerja sama dengan India, Uni Eropa dan Brazil. Ketiga negara tersebut juga memiliki ambisi yang sama untuk mengatasi perubahan iklim di *Paris Agreement* sama seperti Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan paket stimulus yang lebih luas untuk melipatgandakan prioritas yang ada dalam kerangka kerja industri dan ekonomi digital untuk tetap berkomitmen pada sistem energi terbarukan yang Tiongkok jalankan dengan beberapa negara untuk mengatasi masalah emisi gas karbon.

Target penurunan emisi di Tiongkok sebagai strategi revolusi asumsi dan target pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang *Chinese dream*. Strategi *Chinese dream* ini sebagai pengembangan impian yang diusulkan pada tahun 2012 oleh Sekretaris Jenderal Xi Jinping yang menyatakan bahwa target pembangunan Tiongkok untuk menjadi lebih modern yang makmur, kuat, demokratis, maju secara budaya, dan harmonis yang ingin dicapai. Xi Jinping berharap Tiongkok harus bisa mengejar strategi ini dan bisa merangkul implementasi dari strategi energi. *Chinese dream* dalam penurunan emisi ini akan berfokus pada target skenario pengurangan emisi dengan mengembangkan energi terbarukan dan pengurangan teknologi untuk industri padat energi. Target dan strategi ini akan memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang dilakukan secara mendalam dengan target strategi ekonomi (Ji-Feng, Zhong-Yu, Ya-Xiong, & Zhi-Chao, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa :

Mengapa Tiongkok tetap bertahan dalam *Paris Agreement*, sedangkan Tiongkok negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Tiongkok masih bertahan di *Paris Agreement*.
2. Untuk mengetahui peran aktif Tiongkok dalam *Paris Agreement*.

1.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini akan membahas alasan Tiongkok sebagai negara dengan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang akan berdampak pada keamanan lingkungan. Tiongkok masih bertahan menjadi anggota tetap *Paris Agreement*. Salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah Tiongkok yaitu Amerika Serikat, yang sebelumnya merupakan salah satu anggota *Paris Agreement*. Tetapi pada tahun 2017 Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari *Paris Agreement*. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas alasan Tiongkok masih tetap bertahan sebagai anggota tetap *Paris Agreement*. Penelitian ini sebelumnya belum pernah dibahas terutama menggunakan teori kebijakan luar negeri. Urgensi dalam penelitian ini untuk menganalisis alasan Tiongkok yang tetap bertahan dalam *Paris Agreement* yang ditinjau dari

sudut pandang hubungan internasional melalui model rasional aktor teori Graham Allison yang dapat memberikan gambaran mengenai keputusan yang diambil Tiongkok dalam *Paris Agreement* termasuk dalam kebijakan luar negeri jika dilihat dari model rasional aktor.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tiongkok sebagai salah satu negara yang bergabung di *Paris Agreement*. Dalam *Paris Agreement* terdapat 196 negara yang mengikuti dan menyepakati isi dari naskah *Paris Agreement*. Terdapat 15 negara yang sudah meratifikasi *Paris Agreement*. Tetapi dari banyaknya negara yang bergabung di *Paris Agreement* dalam penelitian ini akan berfokus kepada Tiongkok karena Tiongkok termasuk sebagai salah satu negara dengan penyumbang emisi gas karbon terbesar, dan termasuk dalam salah satu dari 15 negara anggota yang meratifikasi *Paris Agreement*. Dalam pemilihan waktu di penelitian ini berfokus pada tahun 2017 di mana emisi pada tahun tersebut semakin meningkat. Pada tahun 2017 ini Tiongkok juga berkomitmen dalam menurunkan emisi karbonnya dengan mulai meluncurkan pasar karbon nasional. Peluncuran pasar karbon ini juga sebagai salah satu komitmen Tiongkok untuk mengurangi emisi gas karbon dan bertahan dalam *Paris Agreement*. Untuk menganalisis alasan Tiongkok tetap bertahan dalam *Paris Agreement*, penelitian ini menggunakan teori model rasional aktor Graham Allison untuk menjelaskan tujuan Tiongkok tetap bertahan dalam *Paris Agreement*.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal *The Paris Agreement : a New Beginning* yang dituliskan Streck Charlotte, Kennly, Paul mengatakan *Paris Agreement* dibentuk sebagai salah satu fondasi dalam dunia politik internasional dan perjanjian antar negara dengan mengakhiri negosiasi ketika sebelumnya tidak menemukan jalan dari permasalahan dalam permasalahan iklim dunia. Hingga akhirnya sepakat untuk membentuk salah satu perjanjian yang disepakati oleh negara-negara yang terlibat. Kontribusi dari masing-masing negara tentunya berbeda-beda dan tidak semua mencapai sasaran iklim secara keseluruhan. *Paris Agreement* adalah sebagai kerangka kerja yang tepat untuk mengatasi masalah aksi kolektif pada perubahan iklim (Streck, Keenlyside, & Unger, *The Paris Agreement : A New Beginning*, 2016). Berbeda dengan Streck Charlotte dan teman-temannya yang menjelaskan mengenai bagaimana *Paris Agreement* dibentuk dan bagaimana dijalkannya *Paris Agreement*, dalam jurnal *Diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam Paris Agreement tahun 2015-2016* yang ditulis oleh Koemini Aytullah dan Rani Faisyal juga berpendapat mengenai *Paris Agreement* dalam masalah lingkungan dan mengatakan bahwa dampak dari masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh satu negara akan menimbulkan masalah bagi negara lainnya. Dalam permasalahan lingkungan tentunya bukan lagi menjadi masalah dan tanggung jawab satu negara saja. Adanya inisiatif masyarakat internasional melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai rezim internasional yang bertugas untuk melawan pergantian iklim. Dalam rezim tersebut terdapat

berbagai negara yang dalam negara tersebut terdapat Amerika Serikat dan Tiongkok yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pada *Paris Agreement* (Streck, Unger, & Keenlyside, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016).

Dalam jurnal Keberhasilan Ratifikasi AS-Tiongkok atas *Paris Agreement* dalam Meningkatkan Legitimasi Rezim Mitigasi Global *Climate Change* yang dituliskan Faiz Fahri lebih berfokus bagaimana perjanjian internasional *Paris Agreement* juga mengatakan bahwa kesepakatan ini juga harus diikuti kontribusi dari semua negara dalam pengurangan emisi tetapi berbeda yang berfokus pada negara Tiongkok yang memang memproduksi emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Tiongkok sebagai negara berkembang yang semakin pesat pertumbuhannya dan sebagai penghasil karbon dioksida terbesar di dunia dengan Amerika Serikat sebagai negara maju dalam perjanjian global mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim ini dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Diplomasi Tiongkok dalam *Paris Agreement* telah menghasilkan ratifikasi Amerika Serikat dengan Tiongkok. Untuk pertama kalinya, Perjanjian Internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mencakup kontribusi dari semua negara-negara penghasil emisi utama dari sebagian besar negara yang ada di dunia (Fa'iz, 2018).

Zhang Zhong Xiang dalam jurnalnya yang berjudul *China, the United States and Technology Cooperation on Climate Control* mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing merupakan penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia. Sehingga Amerika Serikat dan Tiongkok

harus terlibat dalam memerangi perubahan iklim global dalam negosiasi internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok seharusnya mempunyai satu tujuan penting yang sama. Amerika Serikat mencoba melakukan teknologi yang bisa digunakan dalam hal perubahan masalah iklim dan melakukan kerja sama teknologi dan kemitraan dengan Asia Pasifik (APP) untuk pembangunan iklim yang bersih. Tiongkok juga telah mengikuti jejak langkah Amerika Serikat dalam melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembersihan iklim dan melakukan semua secara inisiatif dipimpin oleh Amerika Serikat dan terbukti dengan pembawaan manfaat nyata. Tiongkok sudah mulai melakukan penanaman pohon-pohon kembali, mengurangi limbah industri. Jurnal ini membahas bagaimana Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara emisi gas rumah kaca terbesar melakukan mitigasi mengurangi emisi tersebut (Zhang Z. X., 2007).

Zhang Hai Bin, dan teman-temannya mengatakan dalam jurnal yang berjudul *US Withdrawal from the Paris Agreement: Reason, Impact, and China's Response* bagaimana Amerika Serikat yang keluar dari *Paris Agreement* dan bagaimana Tiongkok merasakan tekanan yang sebagai besar dalam menghadapi masalah emisi ini tetapi dalam hal ini Amerika tidak lepas tangan begitu saja dan tetap membantu. Tiongkok dianggap menghadapi tekanan semakin besar ketika Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement* karena tuntutan yang semakin besar dari negara-negara lain untuk mengambil alih kepemimpinan iklim global setelah Amerika Serikat keluar. Tiongkok pun benar-benar melakukan capaiannya dalam tujuan mencapai target perubahan iklim domestiknya secara internasional

dan Tiongkok pun tetap menjaga Amerika Serikat agar tetap terlibat dalam kerja sama. Walaupun Amerika Serikat telah keluar, tetapi Amerika Serikat tidak benar-benar melepaskan diri (Zhang, Dai, Lai, & Wang, 2017).

Dapat diketahui bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai negara yang menghasilkan emisi karbon dioksida terbesar. Sehingga masyarakat internasional melakukan bagaimana cara agar polusi yang terbesar ini dapat dikurangi bukan hanya untuk Tiongkok dan Amerika Serikat tetapi bagi seluruh negara di dunia. Semua sepakat untuk membuat *Paris Agreement* sebagai perjanjian perubahan iklim. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dari berbagai sumber jurnal yang didapatkan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki satu tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut. Namun ada satu sumber yang mengatakan bahwa tidak semua negara mencapai sasaran dan tidak semua negara dapat mencapai sasaran masing-masing. Saya menganggap bahwa pernyataan tersebut benar, karena walaupun setelah adanya *Paris Agreement* tidak semua negara mencapai sasarnya. Contohnya seperti Tiongkok yang merupakan sebagai penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar dan menimbulkan polusi. Walaupun kita ketahui bahwa Tiongkok sudah saja melakukan pengurangan polusi tersebut tetapi tentu saja hal tersebut masih belum berpengaruh. Kita ketahui Tiongkok masih gencar melakukan pembangunan teknologi industry besar-besaran untuk menjadi negara yang besar.

Dari berbagai sumber yang diuraikan pada awalnya Amerika Serikat memang bergabung dengan *Paris Agreement* dengan Tiongkok dan dengan negara lainnya. Tetapi Amerika Serikat memilih untuk keluar dari *Paris*

Agreement pada tahun 2017. Tiongkok sebagai negara yang bersama dengan Amerika Serikat dalam menangani emisi gas karbon yang tinggi di negaranya merasa bagaimana cara menghadapi sendiri permasalahan negaranya dalam *Paris Agreement*. Tetapi dari berbagai sumber jurnal yang dituliskan bahwa Amerika Serikat tidak lepas tangan begitu saja ketika keluar dari *Paris Agreement* dan Tiongkok tetap melakukan capaiannya untuk menjaga lingkungan negaranya dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

1.7 Landasan Teori/Model/Konsep

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk menganalisis alasan Tiongkok yang masih bertahan dalam perjanjian konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim atau *Paris Agreement*. Mengenai teori kebijakan luar negeri fokus kepada aktor yang terjadi antara bangsa dan lintas negaranya yang didasarkan pada pembuatan keputusan negara yang bertindak secara individu maupun kelompok (Hudson, 2005). Dalam analisis kebijakan luar negeri, negara sebagai anggota dari kelas fenomena internasional fokus pada proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek untuk menghasilkan sebuah keputusan. Dalam klasifikasinya jenis utama kebijakan luar negeri masuk ke dalam kategori status quo, imperialis dan prastise yang pada dasarnya perilaku kebijakan luar negeri sebagai alasan sistematis yang merujuk pada sebuah aturan (Smith, 1986).

Kajian dalam kebijakan luar negeri bisa dikatakan sebagai proses pilihan rasional yang sedang mengalami proses dalam fokus dan dampaknya

pada pilihan kebijakan. Setidaknya sejak akhir Perang Dunia ke II, pemikiran kebijakan telah didominasi oleh perspektif realis atau neorealis di mana negara bagian diambil sebagai unit analisis yang paling relevan. Terjadi juga pergeseran dari orientasi dalam komunitas pilihan rasional yang peduli pada kebijakan luar negeri (de Mesquita, 2010). Karya Graham Allison dalam *Essence of Decision* (1971) memiliki dampak yang sangat besar dalam studi dan pengajaran birokrasi dan pembuatan kebijakan luar negeri. Karya Allison menunjukkan bahwa pendekatan teoritis secara sadar untuk mempelajari birokrasi dan kebijakan luar negeri. Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya Allison juga memberikan tiga model dalam keputusan kebijakan luar negerinya. Model tersebut adalah aktor rasional, proses organisasi, dan Politik Domestik. Allison menunjukkan bagaimana ia menjelaskan secara eksplisit mengenai sebuah peristiwa yang tersirat dalam banyak hal (Bendor & Hammond, 1992).

Model rasional aktor adalah salah satu kerangka kerja analisis kebijakan luar negeri Allison pertama diperkenalkan dan diuraikan di *Essence*. Ketika *Essence* pertama kali diterbitkan pada tahun 1971, rasional aktor mencoba untuk menjelaskan peristiwa internasional dengan menceritakan kembali tujuan dan perhitungan negara atau pemerintah. Rasional aktor juga terisolasi antara keputusan dan pilihan di mana keputusan mengandaikan seorang penentu dan pilihan diantara alternatif mengacu pada beberapa tujuan (Kafle, 2011). Model rasional aktor diasumsikan bahwa aktor pembuat keputusan membuat keputusan mereka yang diyakini akan mengarah kepada hasil terbaik yang memungkinkan

bagi mereka sebagaimana ditentukan oleh nilai-nilai pribadi atau preferensi mereka. Kepentingan para aktor dalam pengambilan keputusan termasuk atau tidak termasuk dalam peningkatan sesuatu kebijakan yang disebut sebagai kepentingan nasional (de Mesquita, 2010).

Selain rasional aktor, model dari teori kebijakan luar negeri Allison yaitu proses organisasi dan politik domestik. Dalam model proses organisasi menjelaskan secara ekstensif bagaimana organisasi berperilaku dan membuat keputusan dan bagaimana keputusan ini diimplementasikan. Sesuai dengan model ini, Politik luar negeri merupakan keluaran dari perilaku organisasi. Organisasi berfungsi sesuai dengan rutinitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap organisasi memiliki fungsi atau misi dan memiliki kinerja tergantung pada anggarannya. Model proses organisasi ini mempertimbangkan aktor organisasi, melakukan pengawasan dalam berbagai aspek urusan luar negeri yang mengharuskan masalah tersebut dipotong dan dibagi menjadi berbagai organisasi dan department, karena setiap organisasi memiliki misinya sendiri. Model ketiga adalah politik domestik. Model ini dilihat sebagai tindakan pemerintah dalam resultan politik. Model politik domestik menganggap keputusan sebagai output dari permainan yang dimainkan oleh para pemimpin pemerintahan. Model ini diusulkan untuk menjelaskan mengapa keputusan pemerintah dibuat, atau mengapa salah satu pola perilaku pemerintah muncul, mengidentifikasi permainan dan pemain, untuk menampilkan koalisi, tawar-menawar dan kompromi. Allison juga menjelaskan dalam model politik domestik ini siapa yang akan terlibat dalam keputusan dan menyampaikan pendapat

dalam membuat proses, dan siapa yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan keluar dan tidak akan berpengaruh dalam keputusan tersebut. Jadi, dalam model politik pemerintahan ini siapa yang bermain dan siapa yang bergantung akan terlibat dalam aksi pengambilan keputusan. Kekuasaan juga berdampak pada hasil ini. Politik adalah tawar-menawar sepanjang waktu dalam sirkuit diantara pemain yang diposisikan secara hirarki dalam pemerintahan (Kafle, 2011).

Untuk menganalisis alasan Tiongkok bertahan dalam *Paris Agreement*, Penulis akan menggunakan salah satu dari tiga model Allison, yaitu rasional aktor. Rasional aktor diyakini sebagai aktor utama dalam pembuat kebijakan yang akan menentukan keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Untuk proses organisasi dalam menjalankan kebijakan luar negeri sekumpulan organisasi akan bekerja sama untuk mengatasi isu yang sedang terjadi. Model proses organisasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan lebih berfokus kepada aktor kepala pemerintahan yang mengambil keputusannya untuk mempertahankan posisinya di organisasi internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Untuk model ketiga yaitu politik domestik. Dalam politik domestik semua elemen pemerintahan domestik memiliki peran pentingnya dalam pengambilan keputusan. Model pemerintahan domestik juga tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak semua elemen pemerintahan Tiongkok ikut andil dalam kebijakan luar negeri yang dibuat untuk mempertahankan *Paris Agreement*.

Dalam model rasional aktor terdapat empat konsep inti yang ditetapkan dalam model ini. Konsep tersebut adalah *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences*, dan *Choice*. Konsep *Goals and Objectives* akan menjelaskan tujuan dari sebuah keputusan akan diambil. Untuk *Goals* sebagai tujuan umum dari keputusan itu dibuat, sedangkan *Objectives* sebagai tujuan khusus dalam dan untuk jangka waktu dekat. Konsep inti kedua yaitu *Alternative*, di mana pembuat kebijakan memilih diantara keseluruhan kebijakan alternatif yang ada pada suatu kondisi tertentu. Untuk lebih jauh dalam mengambil kebijakan alternatifnya ada beberapa rangkaian keputusan tersirat yang diambil dalam mengeluarkan kebijakan. Konsep inti ketiga adalah *Consequences*, yang selanjutnya mengambil aktor rasional untuk mempertimbangkan alternatif yang dilampirkan memiliki sekumpulan konsekuensi atau pilihan tersebut akan menjadi alternatif tertentu yang akan dipilih. Pada konsep ini akan membandingkan dari seluruh alternatif, yaitu kekurangan dan kelebihanannya dan disertai dengan hambatanannya. Terakhir yaitu konsep *Choice*, untuk memilih pilihan yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan dalam pengambilan keputusan (Kafle, 2011).

Penjelasan Model rasional aktor melihat tindakan negara dapat dijelaskan atau diprediksi dalam bentuk situasi obyektif yang dihadapinya dan dikombinasikan dengan empat konsep yang disebutkan di atas. Melalui Model rasional aktor dan empat konsepnya tersebut akan menjelaskan alasan Tiongkok bertahan dalam *Paris Agreement*. Dalam konsep pertama yaitu *Goals and Objectives*, *Goals* sebagai tujuan umum Tiongkok tetap

berupaya untuk mempertahankan posisinya di *Paris Agreement* sedangkan *Objectives* sebagai tujuan khusus Tiongkok berupaya untuk mengurangi emisi gas karbon negaranya. Konsep kedua yaitu *Alternatives*, di mana Tiongkok melakukan kebijakan alternatifnya dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Konsep ketiga yaitu *Consequences*, dari alternatif yang dipilih tadi Tiongkok akan mengetahui kekurangan, kelebihan dan hambatan dari kerja samanya dengan negara-negara lain dalam mengurangi emisi gas karbon negaranya. Konsep terakhir yaitu *Choice*, pemerintah akan menentukan pilihannya dari alternatif yang diambil tadi sebagai tujuan akhir dari kebijakan yang diambil.

Dalam rasional aktor suatu kebijakan luar negeri aktor tunggal memiliki pertimbangan yang rasional dalam setiap keputusan yang diambilnya sebagai kepentingan nasional dan keamanan nasional yang ingin dicapai negara. Xi Jinping sebagai kepala negara Tiongkok sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan membuat keputusan baru dalam tata kelola iklim. Keputusan Xi Jinping dalam *Paris Agreement* untuk meningkatkan kontribusi yang ditentukan secara nasional dan mengadopsi kebijakan dan tindakan yang lebih tegas. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Tiongkok untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon. Xi Jinping juga ingin mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosialnya yang lebih hijau dalam segala bidang sambil terus mengejar pembangunan berkualitas tinggi. Melalui *Paris Agreement*, Xi Jinping bisa mengimplementasikan

target dan berkontribusi lebih banyak lagi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim (Huaxia, 2020).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis. Jenis penelitian ini mengacu dengan menggunakan Teori sebagai bahan dalam dukungan untuk penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan sumber-sumber seperti jurnal ataupun buku. Dalam penelitian jenis ini kita menggali lebih banyak sumber untuk mendapatkan informasi yang lebih detail untuk diteliti dan bisa mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian kali ini terdapat pada aktor negara dan juga perjanjian internasional. Aktor dalam penelitian ini yaitu Tiongkok sebagai salah satu aktor utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian masalah lingkungan ini terdapat juga organisasi atau perjanjian internasional yaitu *Paris Agreement*. *Paris Agreement* sebagai subjek dalam penyelesaian atau menangani masalah lingkungan ini. Objek pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana upaya negara yang memiliki masalah dalam lingkungan mempertahankan posisinya di *Paris Agreement*. *Paris Agreement* sebagai alternatif untuk menangani permasalahan lingkungan Tiongkok yang semakin tercemar. Melalui perjanjian ini diharapkan setidaknya bisa mengurangi perubahan iklim.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sekunder di mana data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dilakukan secara langsung. Metode pengumpulan data ini bisa melalui orang lain ataupun menggunakan dokumen atau data dari internet. Bisa melalui jurnal ataupun buku. Metode ini menggunakan berbagai jenis literatur yang dilakukan dengan menggunakan banyak sumber yang dikumpulkan dan dianalisis **Invalid source specified.**

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data melalui literatur, sumber-sumber data seperti jurnal ataupun buku. Setelah sumber-sumber tersebut sudah terkumpul selanjutnya adalah melakukan analisis. Dalam analisis inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan atau data dalam proses penelitian. Dari metode penelitiannya yang menggunakan data sekunder yaitu dengan mendapatkan data secara tidak langsung maka perlu mencari sumber dan menganalisis terlebih dahulu. Setelah data diperoleh dan dianalisis barulah dijadikan sebagai data dalam pengumpulan.

BAB II

Dalam bab ini akan menjelaskan peran Tiongkok dalam *Paris Agreement* dan aspek emisi gas rumah kaca di Tiongkok. Sub bab pertama di bab ini akan menjelaskan *Paris Agreement* sebagai perjanjian konvensi kerangka kerja PBB yang mengatasi perubahan iklim dan akan menjelaskan isi dari *Paris Agreement*. Pada sub bab kedua akan menjelaskan keikutsertaan dan peran Tiongkok dalam *Paris Agreement*. Langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok untuk mengimplementasikan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim melalui *Paris Agreement*. Sub bab ketiga akan menjelaskan aspek emisi gas rumah kaca di Tiongkok akibat kebutuhan energi yang semakin meningkat dan komponen-komponen yang menyebabkan emisi gas rumah kaca di Tiongkok semakin tinggi.

2.1 KIPRAH TIONGKOK DALAM PERJANJIAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Tiongkok terus memainkan peran utama dalam memecahkan masalah lingkungan global karena ukurannya dan pertumbuhan ekonominya yang melonjak. Tiongkok adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terus meningkat, badan energi internasional memperkirakan bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca di Tiongkok untuk periode 2000 hingga 2030 hampir sama dengan negara lain di dunia. (Jimin, 2005). Pada tahun 1992 Tiongkok memimpin sesi dari 41 negara berkembang tentang lingkungan dan pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro. Namun Partisipasi Tiongkok dalam KTT Bumi Rio ini

menyebabkan terjadinya pengadopsian agenda 21 Dewan Negara untuk Tiongkok yang mencakup kecuali semua kecuali pembangunan berkelanjutan. Partisipasi terbaru Tiongkok dalam konvensi internasional juga mengungkapkan keterlibatannya dalam negosiasi peta jalan Bali pada tahun 2007 (McBeath & Wang, 2008).

Sejak bergabung dengan PBB, Tiongkok telah meratifikasi lebih dari 50 multilateral kesepakatan lingkungan, termasuk hampir semua yang dipertimbangkan. Jumlah terbesar ditandatangani dari akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Tiongkok juga meratifikasi Amandemen London pada Protokol Montreal pada tahun 1991 dan Amandemen Kopenhagen pada tahun 2003. Pada bulan Desember 2007 Tiongkok telah mempresentasikan pernyataan bersama pertama mereka di Konvensi Kyoto di Bali. LSM lingkungan Tiongkok bekerjasama dengan LSM internasional telah mengasumsikan peran yang lebih menonjol dalam upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Tiongkok. Dalam menyambut *Paris Agreement* Tiongkok secara perlahan telah bergeser menuju ke arah perbaikan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Lebih jauh lagi, Tiongkok kemudian semakin mengembangkan *concern* mereka di aspek lingkungan ke tingkat internasional. Tiongkok kembali merilis rencana perubahan iklim nasional pertama tahun 2015 yang terdiri dari langkah-langkah yang diambil yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan emisi gas rumah kaca Tiongkok, hingga pada tahun 2016 Tiongkok meratifikasi *Paris Agreement* (McBeath & Wang, 2008).

Sejak tahun 2000-an ketegangan terjadi antara posisi Tiongkok dengan lingkungan global dan harapan masyarakat internasional. Sebelum Tiongkok meratifikasi traktat *Paris Agreement*, sebanyak 23 negara telah lebih dahulu meratifikasi kesepakatan tersebut. Para kepala anggota G-20 berkumpul, di Hounghou, Cina. G-20 sendiri merupakan kelompok 20 ekonomi utama dengan perekonomian besar di dunia ditambah oleh Uni Eropa. Tiongkok mengumumkan bahwa mereka meratifikasi *Paris Agreement* yang dicapai di Paris, dan memberikan dorongan besar dan upaya untuk mewujudkan kesepakatan tersebut pada akhir tahun 2016. Tiongkok telah mengatakan bahwa mereka telah meratifikasi *Paris Agreement* pada 3 September 2016 yang di negosiasikan di Paris pada tahun 2015 sebelum menjadi tuan rumah KTT G-20. Perjanjian mulai berlaku dan diikuti setidaknya 55 negara dengan penghasilan emisi global yang tinggi (Asia News Monitor , 2016).

Tiongkok telah terlibat dalam beberapa perjanjian bilateral mengenai perubahan iklim dan energi bersih dengan Jerman, Inggris, Prancis, India dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri memegang emisi gas karbon terbesar di dunia, hingga kedua negara ini mencoba untuk mendukung pengurangan emisi karbon. Berkaitan dengan *Paris Agreement* Tiongkok menargetkan dan menegaskan kembali niatnya untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan untuk mengurangi intensitas karbon hingga 60%-65%. Xie Zhenhua, kepala negosiator Tiongkok di Paris *Climate Change* telah menekankan bahwa posisi Tiongkok adalah untuk mengamankan kesepakatan tersebut dan

menyediakan mekanisme untuk mengatasi perubahan iklim, untuk mengkonfirmasi komitmen internasional terhadap pembangunan rendah karbon, dan untuk menyelesaikan masalah pendanaan dan transfer teknologi yang selalu menjadi perhatian negara berkembang (LI, 2016).

Pada 3 September 2016, Tiongkok telah meratifikasi *Paris Agreement* dan menyerahkan NDC (*Nationally Determined Contribution*) ke UNFCCC yang mencakup beberapa elemen :

- Puncak emisi CO₂ pada tahun 2030, atau lebih awal jika memungkinkan;
- Meningkatkan sumber energi non-fosil dalam total pasokan energi primer menjadi sekitar 20% pada tahun 2030;
- Menurunkan intensitas karbon sebesar 60% menjadi 65% dibawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030;
- Meningkatkan volume stok hutan sekitar 4,5 miliar meter kubik, dengan perbandingan level tahun 2005 (Climate Action Tracker , 2020).

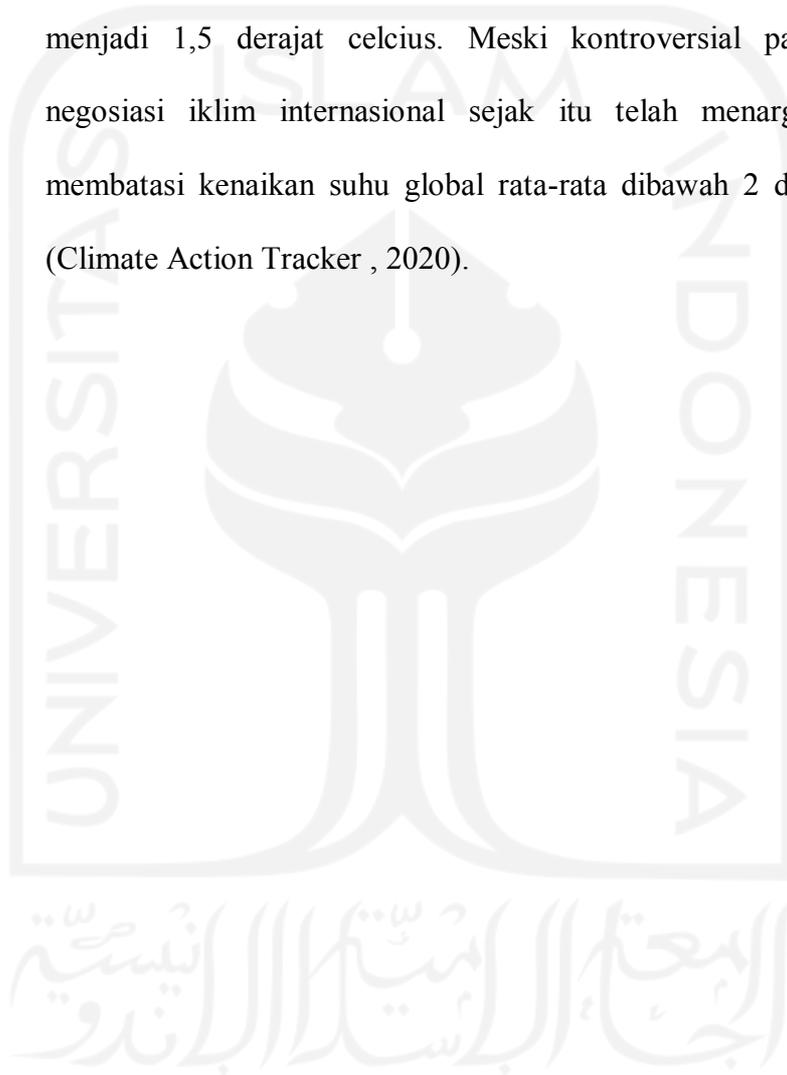
Diantara langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok untuk mengimplementasikan tindakan yang dilakukan untuk perubahan iklim juga mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:

- Meningkatkan gas alam dalam total pasokan energi primer menjadi sekitar 10% pada tahun 2020;
- Pengurangan yang diusulkan dalam produksi HCFC22 (35% dibawah level 2010, dan 67,5% pada tahun 2025) dan akan mengendalikan produksi HCFC23 pada tahun 2020.

Tiongkok belum mengajukan NDC yang telah direvisi ke UNFCCC meskipun Menteri lingkungan Tiongkok Li Ganjie sebelumnya mengindikasikan bahwa Tiongkok akan memperbarui NDC-nya pada tahun 2020 dan pernyataan diperkuat dalam rilis bersama oleh Tiongkok, Prancis dan Sekretaris Jenderal PBB. Selama KTT UE-Tiongkok pada September 2020, UE mendesak Tiongkok untuk menyesuaikan ambisi iklimnya dengan memuncaknya emisi CO₂ pada tahun 2025 dan mencapai nol bersih pada tahun 2060. Pada sidang ke-75 Sidang Umum PBB pada 22 September 2020, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok akan meningkatkan kontribusi yang ditentukan secara nasional dan bertujuan untuk mencapai puncak emisi CO₂ sebelum 2030. Xi Jinping juga mengumumkan niatnya untuk mencapai netralitas karbon sebelum 2060 (Climate Action Tracker , 2020).

Selama proses negosiasinya di *Paris Agreement*, Tiongkok selalu mengkoordinasikan posisinya dengan negara lainnya seperti Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Tiongkok bersikeras untuk meningkatkan tingkat dukungan keuangan pada tahun 2020 oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan penyediaan bersama sebesar US\$ 100 miliar setiap tahun pada tahun 2020 untuk mitigasi dan adaptasi. Tiongkok juga bersikeras untuk meningkatkan keuangan dan mengalir konsisten dengan jalur menuju emisi gas rendah dan iklim pembangunan Tangguh. Semua elemen dan prinsip ini dimasukkan kedalam *Paris Agreement*. Mulai dari minggu kedua negosiasi *Paris Agreement*, Uni

Eropa dan AS bergabung dengan 79 negara dari Afrika, Karibia, dan Pasifik untuk membentuk Koalisi ambisi tinggi”. Koalisi ini terdiri dari lebih dari 100 negara dunia maju dan berkembang yang sangat mendorong target 1,5 derajat. Tiongkok awalnya dilaporkan telah menentang dimasukkannya untuk menjaga suhu rata-rata global naik menjadi 1,5 derajat celcius. Meski kontroversial pada awalnya, negosiasi iklim internasional sejak itu telah menargetkan untuk membatasi kenaikan suhu global rata-rata dibawah 2 derajat celcius (Climate Action Tracker , 2020).



2.2 PARIS AGREEMENT

Dalam beberapa tahun terakhir ini anggaran untuk penanganan emisi gas dunia menjadi lebih tinggi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan besar pada energi dan sistem lainnya menjadi lebih lama. Target untuk pengurangan emisi gas terdiri dari 37 negara dibawah Protokol Kyoto yang mulai berlaku pada tahun 2004, tetapi terhambat sejak awal ketika senat Amerika Serikat menolak untuk meratifikasinya. Tanpa partisipasi AS itulah Protokol Kyoto menjadi semakin tidak efektif dari waktu ke waktu dan mengingat emisi global yang meningkat pesat dan berasal dari Tiongkok, India, dan beberapa negara lainnya (Horowitz, 2016). Hingga pada 12 Desember 2015, 196 pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) membuat sebuah perjanjian Paris yang mengikat secara hukum baru kerangka kerja untuk upaya koordinasi secara internasional yang intens dan menghindari kegagalan pada konferensi iklim Kopenhagen pada tahun 2009 (Streck, Keenlyside, & Unger, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016).

Pemerintah Prancis menjadi tuan rumah dalam pembahasan Paris Agreement dengan Menteri Luar Negeri Laurent Fabius yang bertindak sebagai Presiden Conference of Parties (COP) ke-21. Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC menjadi pejabat pemerintah. Dalam sebuah perjalanan ke Paris, terdapat pengumuman secara bersamaan dari Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai penyumbang polusi terbesar di dunia pada tahun 2014 dan berkomitmen untuk melakukan target mitigasi nasional mereka. Berbeda dengan Protokol Kyoto, yang hanya menetapkan pada pengurangan emisi, Sebaliknya, Paris Agreement merumuskan tujuan perubahan iklim secara keseluruhan dan meminta pihak untuk berkontribusi untuk memenuhi tujuan tersebut dengan prinsip kemampuan dan tanggung jawab dari masing-masing negara. Paris Agreement adalah suatu perjanjian dalam hukum internasional, yang artinya negara-negara akan meratifikasi dan terikat oleh persyaratan saat mulai berlaku. Meskipun demikian perjanjian ini bersifat mengikat dan berkomitmen dalam pengurangan emisi dan memberikan kepercayaan ke dalam proses, prosedur penilaian dan tindak lanjut interaktif dalam upaya mitigasi tiap negaranya (Streck, Keenlyside, & Unger, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016).

Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, memiliki komponen yang paling menonjol dan dominan diantaranya adalah karbon yang tidak diragukan lagi sebagai salah satu masalah lingkungan global yang paling mendalam di dunia saat ini. Akibat dari emisi gas rumah kaca muncul dari semua jenis penggunaan terkait dengan bahan bakar fosil dan karena bahan bakar fosil merupakan bahan dasar dari kebutuhan energi industri modern, di mana emisi gas rumah kaca merupakan bagian dari hampir setiap jenis aktivitas industri modern dan konsumsi masyarakat. Secara umum, pemanasan juga dapat timbul dari gangguan siklus karbon global, seperti deportasi dan perubahan tata guna lahan lainnya. Kemudian kumpulan gas tertentu lainnya yang paling banyak menonjol menjadi nitrous oxide, yang juga dapat menyebabkan pemanasan global (Jayaraman, 2016).

Ancaman dari pemanasan global, dan urgensi dari ancaman tersebut telah diperkuat oleh laporan penilaian berkala dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Laporan IPCC telah diterbitkan setiap lima tahun sejak tahun 1990, dan seiring berjalannya waktu ruang lingkup mereka semakin luas. Negosiasi perubahan iklim dengan demikian harus bersaing dengan politik dan ekonomi perubahan iklim dengan peringatan yang semakin mendesak pada IPCC. Laporan tahunan IPCC telah menetapkan peringatan global sebagai fakta ilmiah. Di negara maju mengangkat pertanyaan iklim di mana pemerintahan di negara maju berusaha mendamaikan tuntutan yang mereka hadap dengan keharusan yang memandu ekonomi mereka dengan tujuan untuk meminimalkan beban kapitalisme perusahaan di negara mereka (Jayaraman, 2016).

Paris Agreement diadopsi sebagai lampiran dalam keputusan COP ke UNFCCC, COP juga mengambil keputusan tersebut untuk memandu tindakan tahun pra-2020, dan menetapkan detail implementasi untuk Paris Agreement sebelum perjanjian ini berlaku. Sebelum Paris Agreement berlaku terdapat keputusan paris (Paris Decision) yang memiliki sejumlah fungsi pelengkap yaitu:

- (i) Menyediakan garis waktu untuk Paris Agreement dan mulai berlakunya yang dijadwalkan pada tahun 2020.
- (ii) Untuk mengatur keterlambatan dan mengatur tindakan untuk implementasi Paris Agreement, termasuk pengaturan kelembagaan mengenai pembentukan Ad Hoc Working Group (AWGPA).
- (iii) Membahas sejumlah susbtansial lainnya, komitmen yang mungkin berkembang selama implementasi Paris Agreement termasuk komitmen keuangan untuk Floor Contribution of 100 Billion USD.
- (iv) Memberikan panduan mengenai pengaturan pra-2020. Keputusan Paris juga termasuk dalam detail yang dianggap oleh delegasi AS sebagai mandat, seperti mengikat terhadap target pada pengurangan emisi yang akan mengubah Paris Agreement yang membutuhkan ratifikasi.

Sekretaris Jenderal PBB bertindak sebagai penyimpan persetujuan Paris Agreement. Perjanjian akan mulai berlaku setelah 55 pihak menyetorkan instrumen ratifikasi dan secara total akuntansi untuk setidaknya sekitar 55% dari total emisi gas rumah kaca. COP dari UNFCCC berfungsi untuk mempertemukan pihak Paris Agreement dan sesi pertama COP bertepatan setelah Paris Agreement mulai berlaku. Upacara penandatanganan tingkat tinggi akan diselenggarakan pada 22 April 2016 di New York, dan Paris Agreement akan tersedia dari 21 April 2017 (Streck, Keenlyside, & Unger, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016). Pihak consensus telah dijadwalkan akan ditutup dan Perjanjian telah diadopsi dengan keputusan konferensi dari pihak tersebut, di mana hasil perjanjian Paris Agreement dilampirkan dan memiliki tiga tujuan yaitu:

- (i) Untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global hingga jauh dibawah 2 derajat Celcius diatas tingkat pra-industri.
- (ii) Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim.
- (iii) Untuk membuat arus pembiayaan konsisten dengan kedua hal diatas.

Tujuan mitigasinya adalah untuk mencapai puncak rumah dari emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan mencapai netralitas emisi pada paruh kedua abad ini diimbangi dengan serapan oleh penyerap karbon seperti hutan-hutan, dengan mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan (Derwent, et al., 2006). Isi utama dari Paris Agreement tersebut adalah :

- Bertujuan untuk menahan pemanasan jauh di bawah 2 derajat dengan membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat;

- Bertujuan agar emisi gas rumah kaca dapat mencapai emisi nol-bersih pada paruh kedua abad ini;
- Terdapat persyaratan untuk langkah-langkah mitigasi dari masing-masing negara untuk diberlakukan dalam kontribusi nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCS);
- Proses yang menuntut revisi NDCS setidaknya 5 tahun sekali untuk mewakili perkembangan melalui NDCS terakhir;
- Mekanisme bagi negara untuk mencapai NDCS bersama, berbagi target mitigasi, dan mekanisme bagi negara untuk bekerja sama dalam mencapai NDCS. Negara dapat mencapai NDCS mereka dengan mentransfer hasil mitigasi internasional baik dalam konteks perdagangan emisi atau jika memungkinkan untuk hasil yang berbasis pembayaran;
- Mekanisme untuk entitas swasta dan public untuk mendukung pembangunan berkelanjutan proyek-proyek yang menghasilkan pengurangan emisi yang dapat dialihkan;
- Terdapat kerangka kerja untuk meningkatkan transparansi dan tinjauan mengenai NDCS;
- Inventarisasi global mulai tahun 2023 dan setiap 5 tahun setelahnya untuk meninjau kemajuan setiap negara;
- Dorongan kepada pihak setiap negara untuk mengimplementasikan kerangka kerja yang ada untuk REDD termasuk melalui penyediaan hasil berbasis pembayaran;

- Tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, dan komitmen untuk menyediakan dukungan dalam peningkatan adaptasi;
- Mengadopsi Warsaw International Mechanism untuk kerusakan dan mencatat bahwa perjanjian tidak melibatkan atau memberikan dasar untuk kewajiban ataupun kompensasi;
- Komitmen untuk menyediakan US\$ 100 miliar per tahun untuk 2025, kemudian setelah 2025 dengan USD 100 miliar sebagai dasar. Disini negara berkembang didorong untuk memberikan dukungannya secara sukarela dan dana public akan memainkan peran pentingnya dalam keuangan dan negara maju harus melaporkan setidaknya dua kali setahun tingkat dukungan yang diberikan;
- Kerangka kerja transparansi ditingkatkan untuk tindakan dan dukungan secara fleksibilitas yang memperhitungkan perbedaan kapasitas dengan tujuan untuk memahami tindakan dari perubahan iklim;
- Mekanisme kepatuhan non-hukuman yang berbasis pada fasilitatif alam (Streck, Unger, & Keenlyside, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016).

Hasil teks akhir dari Paris Agreement ini dimulai dengan tujuan baru dan menantang untuk mempertahankan suhu global di bawah 2 derajat di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. Perjanjian tersebut juga melihat pentingnya adaptasi, perkembangan teknologi dan peningkatan kapasitas dengan mesin baru. Hal tersebut menawarkan dorongan sebagai kerja sama antara beberapa pihak negara termasuk mekanisme yang dijalankan. Sesuai dengan pasal 4.1 dalam Paris Agreement ada dua jenis tindakan yang penting untuk dipenuhi target 1,5 derajat Celcius. Pertama, dunia harus mengurangi emisi ghg(gas-gas yang menyerap panas matahari ketika dipantulkan kembali oleh permukaan bumi), tidak sampai nol, tetapi ke titik di mana ada keseimbangan antara emisi dan penyerapan. Kedua, negara-negara harus meningkatkan opsi untuk menyerap emisi gas (Streck, Keenlyside, & Unger, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016).

Paris Agreement sebagai strategi yang menginformasikan kepada negara-negara internasional sebagai kebijakan yang mengarah dan mengikuti adopsi Protokol Kyoto untuk menentukan target pengurangan emisi dan membutuhkan sejumlah kecil negara industri untuk menangani target ini. Dalam menangani ini Paris Agreement mengakui bahwa negara maju harus memimpin, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah perubahan iklim mereka sendiri. Dalam hal ini Paris Agreement menetapkan target pengurangan emisi dan beban mitigasi baik secara efektivitas dan keadilan. Hal inipun harus melibatkan persamaan yang sangat kompleks, partisipasi global dan kepatuhan. Dengan adanya Paris Agreement sebagai kerangka kerja umum di mana masing-masing aliansi negara diundang dengan mempertimbangkan semua tujuan konvensi dan persetujuan serta kapasitas mereka sendiri (Streck, Unger, & Keenlyside, *The Paris Agreement: A New Beginning*, 2016)

2.3 ASPEK EMISI GAS RUMAH KACA DI TIONGKOK

Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida dan bahan kimia sintetis tertentu memerangkap sebagian energi keluar bumi sehingga menahan panas atmosfer. Perangkap panas inilah yang menyebabkan perubahan keseimbangan radiasi bumi dan keseimbangan antara energi yang diterima dari matahari yang dipancarkan dari bumi kemudian mengubah pola iklim dan cuaca dalam skala global dan regional. Banyak gas rumah kaca yang berumur sangat Panjang di atmosfer, dan beberapa masih ada di udara selama puluhan hingga ratusan tahun setelah dilepaskan. Gas rumah kaca berumur Panjang ini kemudian bercampur

secara global di atmosfer dan mencerminkan kontribusi dari masa lalu dan baru-baru ini dari sumber emisi diseluruh dunia (United States Environmental Protection Agency (EPA), 2019). Emisi gas rumah kaca telah meningkat selama 150 tahun terakhir. Emisi yang disebabkan oleh beberapa gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia telah meningkat secara substansial sejak industrialisasi skala besar dimulai pada pertengahan 1800-an. Sebagian besar emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia (antropogenik) adalah karbon dioksida (CO₂) dari pembakaran bahan bakar fosil (Energy and the Environment Explained (EIA), 2020).

Konsentrasi CO₂ di atmosfer secara alami diatur oleh banyak proses yang merupakan bagian dari siklus karbon global. Pergerakan karbon antara atmosfer dan bumi serta lautan di dominasi oleh proses alami seperti fotosintesis tumbuhan. Meskipun proses alami ini dapat menyerap sebagian emisi CO₂ antropogenik yang dihasilkan setiap tahun (yang diukur dalam istilah ekuivalen karbon) mulai sekitar tahun 1950, emisi CO₂ mulai melebihi kapasitas proses tersebut untuk menyerap karbon. Ketidakseimbangan antara emisi gas rumah kaca dan kemampuan proses alami untuk menyerap emisi tersebut telah mengakibatkan peningkatan berkelanjutan dalam konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Konsentrasi CO₂ di atmosfer telah meningkat sekitar 40% sejak pertengahan 1800-an (Energy and the Environment Explained (EIA), 2020).

Emisi karbon merupakan salah satu jenis emisi gas rumah kaca yang terjadi ketika karbondioksida masuk ke udara setelah adanya aktivitas atau

proses manusia. Badan perlindungan Lingkungan mendaftarkan enam sumber utama gas rumah kaca yaitu transportasi, produksi listrik, industri, komersial dan perumahan, dan penggunaan lahan dan kehutanan. Menurut Inventaris Emisi dan Sinks Gas Rumah Kaca Amerika Serikat, sebuah laporan oleh EPA, transportasi menyumbang 28,9 persen dari semua emisi gas rumah kaca pada tahun 2017 sebagai penyebab terbesar dari semua kategori. Para ilmuwan telah mendokumentasikan dampak dari perubahan iklim ini yaitu:

- Es di kutub bumi mencair. Ini termasuk gletser gunung, lapisan es yang menutupi Antartika Barat dan Greenland, dan es laut Arktik.
- Kenaikan suhu mempengaruhi satwa liar dan habitatnya. Es yang menghilang telah menentang spesies seperti Penguin di Antartika, di mana beberapa populasi di Semenanjung barat telah runtuh hingga 90 persen atau lebih.
- Saat suhu berubah banyak spesies berpindah, dan tumbuhan alpen telah bermigrasi lebih jauh ke utara atau daerah yang lebih tinggi dan dingin.
- Curah hujan (hujan dan salju) meningkat rata-rata diseluruh dunia. Namun beberapa daerah mengalami kekeringan yang lebih parah, meningkatkan risiko kebakaran hutan, kehilangan panen dan kekurangan air minum **Invalid source specified..**

Saat ini Tiongkok telah menghadapi empat masalah lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, emisi gas karbon yang menyebabkan pemanasan global dan kekurangan energi. Emisi gas karbon Tiongkok sendiri bisa dikatakan sangat tinggi karena jumlah penduduk yang

besar, modal investasi yang tidak efisien, ketergantungan pada batu bara, dan perencanaan urbanisasi yang tidak efisien. Tiongkok juga menghasilkan sekitar 80% listriknya dengan teknologi berbahan bakar fosil dan mengeluarkan seperlima dari emisi gas rumah kacanya, hingga pada tahun 2006 Tiongkok telah menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Baru-baru ini Tiongkok juga berinvestasi dalam pembangunan jalan, angkutan umum, hingga menghasilkan listrik dan perumahan yang akan memberikan implikasi pada konsumsi sumber daya, akibatnya total emisi gas rumah kaca Tiongkok menjadi tinggi. Total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Tiongkok pada tahun 2004 sekitar 6.100 juta metrik ton (MMT) karbon. Selama periode 2001-2011, emisi gas rumah kaca Tiongkok meningkat lebih cepat sebesar 166%. *International Energy Agency (IEA)*, menunjukkan bahwa emisi karbon per kapita dari fosil pembakaran bahan bakar sebesar 3,65ton pada tahun 2004 di Tiongkok setara dengan 87% dari rata-rata dunia dan 33% tingkat Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (Mohajan, 2014).

Melampaui India dan Amerika Serikat, emisi karbon dari Tiongkok disebabkan oleh populasi ekonominya yang besar yang diakibatkan oleh kegiatan seperti penggunaan produksi energi, limbah pembuangan dan proses pertanian. Karena perkembangan ekonomi di Tiongkok semakin berkembang, sektor transportasi di Tiongkok pun semakin meningkat pesat. Menurut laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok, pada tahun 2001 Tiongkok memiliki 7,71 Juta mobil pribadi dan jumlahnya bisa meningkat tajam menjadi 140 juta pada tahun 2020. Konsumsi energi yang disebabkan

oleh transportasi menjadi tinggi sehingga Tiongkok mengeluarkan jumlah gas karbon yang besar di atmosfer yang disebabkan oleh transportasi. Dampak buruk yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca di Tiongkok terlihat di pertanian dan peternakan, kehutanan, ekosistem alam dan sumber daya air, serta di pesisir dan zona rentan lingkungan (Mohajan, 2014).

Efek yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca di Tiongkok adalah dengan dampak intensitas badai, kenaikan permukaan laut, penurunan produktivitas pertanian, dan mengurangi ketersediaan air. Tiongkok telah mengambil upaya untuk menciptakan pembersihan energi terbarukan sebagai kebijakan nasionalnya. Tiongkok juga sedang mengembangkan tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, gas alam dan teknologi bahan bakar biomassa. Hal ini menggunakan penggunaan tenaga nuklir dalam pembangkit listrik yang diharapkan produksi ini akan berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Tiga komponen utama yang menyebabkan emisi gas rumah kaca meningkat di Tiongkok yaitu PDB yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan per Capital GDP, Komponen KOTA yang diakibatkan oleh urbanisasi di Tiongkok, dan komponen CO₂ yang didorong dengan sendirinya (Xiangyang & Guiqiu, 2011).

Tiongkok telah mengambil tindakan serius untuk mengurangi energi dan intensitas karbonnya dengan menetapkan sasaran pengurangan intensitas energi untuk tahun 2006-2010 serta pengurangan intensitas karbon untuk jangka panjang hingga tahun 2020. Kerusakan masalah lingkungan telah menjadi masalah besar bagi Tiongkok selama 5 dekade

terakhir dan Pemerintahan Tiongkok menjadi lebih sadar akan permasalahan lingkungan yang dihadapi negaranya. Pemerintah telah memulai beberapa kebijakannya pada tahun 2010 dan bertujuan terus untuk masa depan. Pemerintah Tiongkok bergabung dengan Konvensi Kerangka Kerja mengenai perubahan Iklim (UNFCCC) dari tahun 1992 untuk menstabilkan efek gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang semestinya. Karena emisi gas rumah kaca inilah Tiongkok akhirnya menyadari efek dari pemanasan iklim dan memulai untuk mengatasi emisi gas karbonnya (Mohajan, 2014). Tiongkok telah menginvestasikan 221 miliar dollar Amerika Serikat untuk melakukan pengembangan energi terbarukan yang hampir dua kali lipat dari Amerika Serikat untuk menginvestasikan sumber energi terbarukan. Pemerintah Tiongkok juga menyatakan bahwa dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca per unit PDB pada tahun 2005, mereka akan menguranginya sebesar 40% menjadi 45% pada tahun 2020, dan ini merupakan tanggung jawab besar bagi Tiongkok, tetapi Tiongkok memang harus mewujudkan target untuk pengurangan emisi gas rumah kacanya tersebut (Xiangyang & Guiqiu, 2011).

BAB III

ANALISIS RASIONAL AKTOR DALAM KEBIJAKAN TIONGKOK

BERTAHAN DI *PARIS AGREEMENT*

Dengan bergabungnya Tiongkok dalam *Paris Agreement* dan keputusan Tiongkok meratifikasi perjanjian perubahan iklim tersebut, maka Tiongkok memiliki kewajiban dan tuntutan untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab melakukan koordinasi mengenai kebijakan yang dilakukan dalam hal perubahan iklim dan penanggulangan lingkungan. Perdebatan tentang Hubungan Internasional sebagai disiplin akademis baru terjalin dalam dua pemikiran utama yang salah satunya adalah kita sebut dengan Realisme, dengan sentralitas negara yang proyeksi kekuasaan negara untuk kepentingan negara dan yang lainnya biasa disebut dengan Idealisme yang menyarankan landasan yang lebih luas dalam kerja sama internasional dalam organisasi dan diplomasi multilateral. Negara dan Kekuasaan sebagai salah satu alasan kepentingan negara dalam kebijakan luar negerinya. Graham Allison, dalam studinya pada tahun 1971, *Essence of Decision*, berpendapat bahwa mungkin tidak ada rasionalitas garis lurus tunggal yang ditentukan (Chen, 2017).

Allison mengusulkan tiga model perumusan Kebijakan Luar Negeri dan modelnya yang digunakan hingga saat ini, yaitu Aktor Rasional, Proses Organisasi dan Politik Domestik. Model Aktor Rasional ini dianggap berasal dari Presiden Kennedy. Allison mengatakan bahwa banyak fakta yang harus diabaikan untuk membuat skenario yang sesuai dengan kerangka rasional. Sebuah negara akan bertindak Rasional untuk mempertahankan

kebijakan yang diambil negaranya. Untuk menganalisis alasan Tiongkok tetap bertahan dalam *Paris Agreement*, penulis menggunakan empat konsep dari model Rasional Aktor Graham Allison. Konsep *Goals and Objectives* sebagai tujuan umum Tiongkok tetap bertahan dalam *Paris Agreement* dengan melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan *Paris Agreement*, dan tujuan khusus kepentingan Tiongkok bertahan dalam *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi gas karbon negaranya. Sehingga kepentingan Tiongkok dalam *Paris Agreement* bisa dilihat dari upayanya bertahan dalam *Paris Agreement* dan untuk mengurangi emisi gas karbon negaranya. Konsep kedua *Alternatives* dalam pembuatan kebijakan, Tiongkok akan memilih kebijakan alternatif untuk mengurangi emisi gas karbon negaranya dengan menjalin kerja sama dengan negara lain yang memiliki permasalahan emisi karbon yang sama di negaranya. Konsep ketiga *Consequences*, pada kebijakan ini negara akan membandingkan kelebihan, kekurangan dan hambatan dari semua alternatif. Konsep terakhir *Choice*, perilaku pemerintah dalam hubungan internasional sebagai gambaran yang koheren mengenai pilihan yang memaksimalkan nilai dalam analisis sehingga tindakan yang diambil negara harus dipilih sebagai sarana untuk memaksimalkan nilai agar mencapai tujuan negara.

3.1 GOALS AND OBJECTIVES

Model Rasional Aktor Allison telah memberikan ilustrasi sekilas dari bentuk dan tugas Rasional Aktor untuk menghubungkan tujuan dan tindakan suatu negara. Pemerintah akan berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam kerja sama internasional. Bergabungnya

dengan kerja sama internasional dilakukan sebuah negara jika adanya kalkulasi *cost and benefit*. Sehingga secara tegas dikatakan bahwa untuk mencapai kerja sama dalam politik dunia merupakan suatu hal yang sulit. Meskipun negara memiliki kepentingan nasional yang kuat, sebenarnya pemerintah tidak dapat mendefinisikan kepentingan nasionalnya secara tepat dan selalu dibarengi dengan kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan melakukan tujuannya, Tiongkok melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan *Paris Agreement* dan Kepentingan Tiongkok sebagai tujuan khususnya dalam *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi gas karbon (Rinayuhani, 2017).

3.1.1 TUJUAN TIONGKOK MEMPERTAHANKAN *PARIS AGREEMENT*

Presiden Tiongkok, Xi Jinping telah berjanji untuk melindungi dan mempertahankan *Paris Agreement* adalah sebuah keputusan yang sangat penting. *Paris Agreement* sebagai wadah Tiongkok untuk mengatasi perubahan iklim dan mengekang emisi bahan bakar fosil. Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari *Paris Agreement* membuat pakar iklim khawatir akan langkah yang diambil itu dan akan membuat perjanjian menjadi kacau. Xi Jinping mengatakan kepada Mr Macron, Tiongkok dan Prancis harus sama-sama melindungi pencapaian pemerintahan global, termasuk *Paris Agreement*. Hampir 200 negara telah mendukung adanya *Paris Agreement* yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global hingga jauh dibawah 2 Derajat Celcius. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengalihkan ekonomi dunia dari bahan bakar fosil dalam upaya untuk

membatasi banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut (BBC NEWS, 2017).

Keberhasilan KTT Iklim Paris sebagai hal yang sangat penting bagi promosi aktif Tiongkok. Negosiasi yang mengarah kepada *Perjanjian Iklim Paris* memperoleh dorongan baru karena upaya yang dilakukan Tiongkok pada akhir September 2015. Saat itu Presiden AS Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Washington DC, dan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai perubahan iklim. Kemudian berlanjut pada awal November, Presiden Prancis Hollande berkunjung ke Tiongkok untuk mencapai konsensus dengan Presiden Xi Jinping mengenai kerangka dasar *Paris Agreement* untuk membuat kemajuan dalam setiap kerangka setiap lima tahun. Dengan semangat ekologis, upaya Tiongkok dalam mempertahankan *Paris Agreement* ditandai dengan mempromosikan pertumbuhan hijau dan rendah karbon. Hal tersebut akan dipromosikan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kerja sama internasional di bidang-bidang tertentu seperti pembersihan energi, pencegahan dan mitigasi bencana, perlindungan ekologi, membuat pertanian cerdas, dan kota rendah karbon. Tiongkok juga membantu negara berkembang lainnya untuk meningkatkan kapasitas dengan pembiayaan mereka. Dalam hal ini bisa dikatakan peran Tiongkok dalam finalisasi *Paris Agreement* tidak terbantahkan (Hongyuan, 2016).

Dalam mempertahankan posisinya di *Paris Agreement*, Tiongkok berfokus pada penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi emisi karbon dengan melakukan pengembangan industri rendah karbon, penelitian dan

pengembangan teknologi karbon, dan penetapan standar terkait tentang sistem keuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam ekonomi baru, perdagangan, dan termasuk persaingan teknologi. Pembangunan rendah karbon memiliki inovasi teknologi sebagai mode dasar untuk meningkatkan efisiensi energi, hingga kelas energi campuran, mengembangkan energi baru terbarukan dan bentuk pertumbuhan mode konsumsi. Pada setiap tahunnya Tiongkok telah melakukan efisiensi kerjanya dengan menerbitkan kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Tiongkok menerapkan target perubahan iklimnya melalui rencana pembangunan sosial ekonomi selama lima tahun. Tiongkok berencana untuk mengurangi CO₂ nya dengan emisi per unit Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 17% pada tahun 2015 berdasarkan data tahun 2010. Menurut data statistik, Tiongkok mengurangi emisi CO₂ per unit PDB sebesar 15,8% jika dibandingkan dengan tahun 2010, sehingga mencapai 92,3% dari target pengurangan karbon yang ditetapkan dalam rencana lima tahun ke depan (Yun, 2016).

Setelah konferensi Perubahan Iklim Paris, Tiongkok merilis Rencana Lima Tahun ke-13 untuk ekonomi nasional dan pembangunan sosial pada Maret 2016, di mana persyaratan untuk pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang efektif, adaptasi aktif terhadap perubahan iklim, dan internasional yang luas dalam kerja sama nasional yang diatur secara terpisah dengan rencana tersebut, Tiongkok akan secara efektif mengontrol emisinya di industri utama seperti pembangkit listrik, baja, bahan bangunan dan industri kimia pada tahun 2020. Sektor prioritas tersebut sebagai

industri, energi, bangunan, dan transportasi yang akan bergerak maju menjadi sektor rendah karbon. Tindakan ini akan mempercepat pengurangan emisi di Tiongkok dan menghubungkan karbonnya dalam pasar dan mekanisme pelaporan dan verifikasi dengan negara lain (Yun, 2016). Upaya yang dilakukan Tiongkok tersebut untuk mengatasi perubahan iklimnya sekaligus mempertahankan posisinya dalam *Paris Agreement*. Tiongkok juga melakukan laporan per tahunnya dari setiap kebijakan yang diambilnya dalam *Paris Agreement* dalam pengurangan emisi gas karbon di Tiongkok.

Xi Jinping sebagai pemimpin Tiongkok pertama sejak Deng Xiaoping yang kuat dan cukup untuk mendorong pemikiran ulang mengenai strategi kebijakan luar negeri Tiongkok dengan visinya *Chinese dream*. Xi Jinping telah mempromosikan *Chinese dream* sejak ia menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKC) pada 18 November 2012. Xi Jinping menyoroti *Chinese dream* sebagai bentuk tema pemersatu untuk mencapai kebangkitan nasional. *Chinese dream* adalah bagian dari upaya kepemimpinan Tiongkok saat ini untuk memastikan stabilitas domestik dan mempertahankan kontrol dan legitimasi mereka sendiri di dalam negeri. Pemikiran para pemimpin Tiongkok tentang perkembangan dalam peran internasional Tiongkok juga disajikan dalam *Chinese dream* Xi Jinping mengenai peluang bagi Tiongkok dalam sistem internasional dan membuka jalan bagi kebijakan luar negeri Tiongkok. Ambisi Tiongkok terhadap *Paris Agreement* sebagai usaha Xi Jinping untuk memposisikan Tiongkok dalam

visi *Chinese dream*-nya sebagai penentu kecepatan global dalam perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Sorensen, 2015).

Xi Jinping berusaha untuk membedakan pendekatan Tiongkok dari gagasan tradisional Barat tentang lingkungan hidup liberal. Hal ini juga termasuk dengan menggarisbawahi pentingnya ekonomi dalam aksi lingkungan. Hingga saat ini, kepentingan domestik telah mendorong lingkungan hidup Tiongkok yang bergulat dengan dunia konferensi iklim PBB dan Tiongkok berperan penting dalam mempertahankan *Paris Agreement*. Melalui *Paris Agreement*, setidaknya Tiongkok dapat menggunakan jalan ini sebagai kesempatan untuk secara resmi menimpan strategi dekarbonisasi jangka panjangnya dengan konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim sejalan dengan tujuan Xi Jinping. Ini adalah peluang internasional bagi Tiongkok dan juga peluang internasional utama bagi Xi Jinping. Karena hal ini sejalan dengan kepentingan domestik negara untuk meningkatkan ekonominya, sekaligus membersihkan lingkungannya, dan menopang ketahanan energinya (Rudd, 2020).

3.1.2 KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM *PARIS AGREEMENT*

Tiongkok telah mengalami banyak perubahan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi negaranya. Reformasi ekonomi telah meningkatkan perdagangan Tiongkok dengan dunia luar. Aksesnya ke *World Trade Organization* (WTO) telah menjadikan Tiongkok sebagai “Pabrik Dunia” dan membantunya mengakumulasi kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersamaan dengan pencapaian ekonomi Tiongkok yang

semakin meningkat, volume emisi karbon Tiongkok meningkat secara eksponensial dan telah melampaui Amerika Serikat sebagai penghasil emisi karbon terbesar di dunia sejak 2005. Dalam tingkat keputusan, baik dari para pemimpin Tiongkok maupun Amerika Serikat menunjukkan kepemimpinan mereka dalam membuat kesepakatan di *Paris Agreement*. Dalam hal ini Tiongkok telah dipuji dalam pers luar dan dalam negeri atas peran aktif dan konstruktifnya dalam membawa KTT Iklim Paris membuahkan hasil (F. Li, 2016).

Untuk mengatasi perubahan iklim dan energi bersih, Tiongkok sebenarnya telah terlibat dalam sejumlah perjanjian bilateral dengan Jerman, Inggris, Prancis, India dan Amerika Serikat. Kerja sama yang dijalin Tiongkok pada tahun 2015 dengan *Paris Agreement* menjadi tonggak sejarah mereka yang disadari oleh perubahan besar dalam politik domestik dan untuk pengupayaan mendukung pengurangan emisi gas karbon. Sehubungan dengan *Paris Climate Summit*, Tiongkok juga mengajukan *Intended Nationally Determined Contributions* (INDC) sendiri yang dalam detail pengurangannya menargetkan dan menegaskan kembali niatnya untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan untuk mengurangi intensitas karbon hingga 60-65% dari tingkat tahun 2005. Tiongkok juga bergandengan tangan dengan miliarder internasional untuk berinvestasi lebih banyak dalam penelitian mengenai energi bersih (F. Li, 2016).

Xie Xenhua Kepala negosiator Tiongkok di *Paris Climate Summit*, menekankan bahwa posisi Tiongkok untuk mengamankan kesepakatan

dalam *Paris Agreement* menyediakan mekanisme untuk mengatasi perubahan iklim, dan untuk mengkonfirmasi komitmen internasional terhadap pembangunan rendah karbon Tiongkok untuk menyelesaikan masalah pendanaan dan transfer teknologi yang paling menjadi perhatian negara berkembang. Pada akhirnya KTT Iklim Paris menghasilkan consensus yang mengikat secara hukum oleh 195 negara peserta untuk melakukan pembatasan pemanasan global hingga 2 Derajat Celcius diatas tingkat industri dengan tujuan untuk menurunkannya menjadi 1,5 Derajat Celcius. Setiap negara anggota *Paris Agreement* juga mencoba untuk meninjau masing-masing dari INDC-nya setiap lima tahun sebagai cara untuk memantau efektivitas pengurangan emisi karbon dalam skala global. Hasil akhir dari *Paris Agreement* tampaknya menunjukkan bahwa Tiongkok telah melakukan segala cara untuk membuat suaranya didengar, dan tampaknya memainkan peran yang sangat diperlukan untuk mencapai sebuah perjanjian. Seperti yang dikatakan oleh Arthur Mol dan Neil Carter dari Universitas New York dan Universitas Wageningen, integrasi Tiongkok lebih dalam dengan komunitas internasional, dan tidak dapat dihindari bagi Tiongkok untuk memainkan perannya yang lebih besar lagi dalam negosiasi lingkungan dan untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi untuk membuahkan hasil yang maksimal (F. Li, 2016).

Faktanya secara keseluruhan, pandangan Tiongkok terhadap *Paris Agreement* dan kerja sama Tiongkok dalam memerangi perubahan iklim pada umumnya sangat positif dan dalam banyak kasus berbasis fakta dan non-polemik. Dalam hal ini Tiongkok juga menyadari kebutuhan untuk

bekerja sama dengan negara lain untuk menangani masalah perubahan iklim, menerima adanya bahaya yang ditimbulkan dalam perubahan iklim, dan menangkap manfaat yang Tiongkok dapatkan dalam berperang melawan perubahan iklim dengan tidak hanya memperkuat pemerintahan global secara keseluruhan, tetapi juga menetransisikan ekonomi Tiongkok yang lebih berkelanjutan untuk tingkat pertumbuhan jangka panjang. Xi Jinping juga menyatakan dalam pidato yang diberikannya di PBB Kantor Jenewa *Paris Agreement* adalah tonggak sejarah tata kelola iklim. Kita harus memastikan upaya ini agar tidak tergelincir. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengimplementasikan *Paris Agreement*, dan Tiongkok akan terus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim dan sepenuhnya menghormati kewajibannya. Demikian pernyataan yang diberikan kepala negara Tiongkok tersebut, sebagai kepentingan Tiongkok dalam konvensi perubahan iklim PBB, *Paris Agreement* (Swaine, 2020).

Sebagai penghasil emisi terbesar di dunia, Tiongkok telah memperkuat komitmen iklimnya. Ini untuk pertama kalinya Presiden Xi Jinping berbicara mengenai pemotongan emisi hingga nol bersih. Hal ini sekaligus meningkatkan standar bagi negara berkembang lainnya seperti India untuk mencapai netralitas karbon yang masih dalam tahap awal. *Paris Agreement* sangat berperan penting dalam komitmen Tiongkok untuk mencapai target pengurangan emisinya. Xi Jinping juga berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan yang lebih kuat yang dirancang untuk mencapai puncak emisi CO₂ Tiongkok sebelum 2030 dan mencapai netralitas karbon. Target baru Tiongkok ini akan berdampak besar pada

upaya global untuk mengatasi krisis iklim. Motivasi Tiongkok meningkatkan ambisinya menjadi kepentingan yang memberikan keuntungan bagi Tiongkok dalam melakukan dekarbonisasi ekonominya yang bekerja secara lebih agresif. Kepentingan tersebut yang pertama adalah kepentingan ekonomi solusi iklim. Para pemimpin Tiongkok tahu bahwa mereka tidak dapat selamanya menopang biaya secara penuh dalam mengatasi perubahan iklim negaranya. Mereka dapat melihat dari biaya energi terbarukan, penyimpanan baterai, dan kendaraan listrik yang membuat investasi skala besar dalam teknologi rendah karbon menjadi suatu keharusan untuk keberlanjutan, kemakmuran dalam daya saing ekonomi. Oleh karena itu para pemimpin Tiongkok mulai menyadari bahwa hal tersebut menjadi kepentingan Tiongkok untuk memulai transisi agresif ke ekonomi rendah karbon untuk mengurangi emisi mereka sendiri (Herz, 2020).

Kepentingan kedua yaitu *Paris Agreement* sebagai tujuan kolektif untuk menyeimbangkan sumber dan penyerap gas rumah kaca dalam mengembangkan strategi jangka panjang. Pemimpin Tiongkok juga telah menargetkan kembali “nol bersih pada tahun 2050” sebagai tolak ukur tindakan jangka panjang dimana negara membuat strategi yang jelas-jelas sesuai dengan tujuannya, yaitu 1,5 derajat celcius. Meskipun target baru Tiongkok tersebut diterima dengan baik karena mewakili pengurangan total yang besar dan karena Tiongkok saat ini adalah penghasil emisi besar pertama di luar Uni Eropa yang mengedepankan tujuan yang begitu ambisius. Ambisi Tiongkok ini telah memperkuat harapan untuk Tiongkok

dapat mengurangi emisinya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kepentingan selanjutnya adalah untuk memperlihatkan komitmen Tiongkok yang kuat secara diplomasi yang berfokus pada iklim. Perubahan iklim dikatakan sebagai kebijakan luar negeri sekunder karena menjadi permasalahan penting yang berfokus pada keamanan, perdagangan dan berimplikasi pada kepentingan nasional negara (Herz, 2020).

Dampak dari perubahan iklim telah meningkatkan agenda diplomatik untuk mempertegas kebijakan negara dalam mengatasi perubahan iklimnya. Ketegasan ini mempengaruhi Tiongkok dan membuat Xi Jinping mengumumkan solusi iklim dengan harapan mencapai tergaet 1,5 derajat celcius dengan menggunakan strategis pengaruh diplomatik dengan menciptakan insentif baru bagi negara-negara lain dalam menjalannya kepentingannya. Untuk mencapai kepentingannya dalam *Paris Agreement*, Tiongkok harus melampaui kesepakatan dan terus mengembangkan serta menerapkan insentif ini untuk membantu mempercepat tindakan negaranya. Kepentingan nasional negara akan mengatur kebijakan luar negeri yang diambil, sehingga aktor akan melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya (Herz, 2020).

3.2 ALTERNATIVES

Sebagai negara penghasil emisi gas terbesar di dunia, Tiongkok melakukan upaya-upayanya untuk memitigasi emisi gas karbon di negaranya. Dengan bergabung di *Paris Agreement* dan mempertahankan posisinya di sana, Tiongkok sudah memperlihatkan keseriusan dan ambisinya untuk mengatasi emisi gas karbon. Sebagai negara yang mengambil keputusan untuk bergabung dengan kerja sama internasional, Tiongkok melakukan beberapa alternatif dalam mencapai tujuan negaranya dengan melakukan beberapa kerja sama dengan negara lain. Alternatif dari kerja sama ini sebagai tujuan Tiongkok untuk bisa mencapai kepentingannya dengan menurunkan intensitas karbon dioksida (karbondioksida emisi per unit PDB) sebesar 60 hingga 65 persen dari tingkat tahun 2005. Dalam hal ini Tiongkok melakukan kerja sama dengan India, Uni Eropa dan Brazil, sekaligus menjelaskan Strategi Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok dengan Kementerian Lingkungan PBB.

3.1.1 KERJA SAMA TIONGKOK DAN INDIA

Tiongkok dan India adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sesuai dengan data dari Ekonomi Global Bank Dunia *Prospects*, India memimpin grafik pertumbuhan Bank dari negara-negara besar dengan tingkat pertumbuhan 7,5 persen, sedangkan Tiongkok telah mempertahankan tingkat pertumbuhan stabil yaitu 7,1 persen. Tiongkok dan India, masing-masing akan kebutuhan energinya terus meningkat dan mendukung pola pertumbuhan masing-masing. Kedua negara ini juga sama-

sama bergantung pada batubara dan minyak sebagai pembangkit energi. Hingga saat ini, Tiongkok dan India telah menetapkan target tinggi untuk menghasilkan listrik Energi Terbarukan (ET) dan melakukan salah satu program untuk perluasan ET terbesar berdasarkan tenaga surya dan energi angin. Melalui program ini terletak peluang besar untuk kerja sama yang baik dan komersial dari perspektif berbagai pengetahuan, seperti halnya instalasi panel surya dan turbin angin yang berlangsung di berbagai topografi dengan tantangan yang berbeda untuk dihadapi (Bharadwaj, 2017).

Tiongkok dan India bangkit sebagai kekuatan penting dalam tatanan dunia global yang berarti mereka saat ini memiliki alat dan platform untuk berinteraksi satu sama lain dalam mendiskusikan masalah nasional, kepentingan regional, dan global. Keterlibatan mereka dengan masalah perubahan iklim telah mencerminkan kapasitas dan keadaan nasional masing-masing negara. Mereka juga berpendapat bahwa tanggung jawab utama untuk membersihkan kekacauan emisi karbon harus terletak pada ekonomi maju, mengingat kesalahan historis mereka sampai akhirnya mengubah rezim di mana tujuan dan kontribusi mereka dalam INDC diterima atas proposal mereka untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun 1993, kunjungan perdana Menteri India Narasimha Rao ke Tiongkok, karena kedua negara ini telah mengakui masalah lingkungan yang mungkin terjadi dan ditangani lebih baik dengan merumuskan program bersama dan pertukaran informasi. Hingga kedua negara ini sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih erat dalam bidang pengelolaan limbah, pengendalian

pencemaran, penilaian dampak lingkungan, Pendidikan dan perundang-undangan lingkungan, dan konservasi satwa liar (Bharadwaj, 2017).

Tiongkok dan India pertama kali menandatangani MoU untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Energi Terbarukan pada bulan Juni 2003, ketika Perdana Menteri India Manmohan Singh mengunjungi Tiongkok dan menandatangani deklarasi mengenai prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama komprehensif antara Tiongkok dan juga India. Mou dalam bidang energi terbarukan telah ditandatangani oleh Kementerian Sumber Energi Non-Konvensional, Pemerintahan Republik India dan Kementerian Sumber Daya Air, dan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (Bharadwaj, 2017). Tiongkok telah menempati urutan pertama dalam total pembangkit listrik dari energi terbarukan dan pemanas dari panas matahari. Dalam hal total investasi dalam kapasitas baru, Tiongkok menduduki peringkat kedua pada tahun 2009, di bawah Jerman tetapi di atas Amerika Serikat. Tiongkok juga menambahkan lebih banyak kapasitas tenaga angin pada tahun tersebut dibandingkan negara lain. Di sisi lain, India juga telah membuat penambahan substansial pada kapasitas tenaga berbasis angin, hingga saat ini India menempati urutan kelima di dunia dalam kategori tersebut, serta dalam total terbarukan kapasitas masuk ke dalam daya air dengan skala besar. India juga mengambil beberapa langkah untuk menambah sumber emisi non-karbon, termasuk dengan tujuan menambah 20.000 MW tenaga surya pada tahun 2022 dan menggandakan bagian tenaga nuklir. India, Tiongkok dan juga Nepal melakukan inisiatif regeneratif ekosistem di wilayah Himalaya (Siddiqi, 2011).

Pada April 2017 Tiongkok dan India meningkatkan energi terbarukan dan keduanya berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target iklim mereka dalam kebijakan iklim energi terbarukan sebagai tujuan iklim *Paris Agreement* dan tetap berada di bawah pemanasan 2 derajat celsius. Investasi energi terbarukan perlu tumbuh pesat dalam dua dekade mendatang agar sejalan dengan target *Paris Agreement*. Tiongkok dan India secara teratur melampaui target energi terbarukan dan keluar dari batu bara. Tiongkok dan India yang saat ini berada di jalur yang baik untuk mencapai target iklim mereka yang ditetapkan untuk *Paris Agreement*. Tiongkok bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan sebesar 38% pada tahun 2020 dibandingkan dengan level sebelumnya, yaitu setara dengan 680 gigawatt dari kapasitas yang terpasang dan investasi sebesar USD 362 miliar dalam energi terbarukan. India juga sedang mengembangkan kapasitas energi terbarukannya dengan cepat dengan instalasi tenaga surya dan angin yang masing-masing melebihi target tahunan sebesar 43%. Untuk India menargetkan 175 gigawatt energi terbarukan yang terpasang. Kedua negara ini ingin keluar dari pembangkit listrik berbasis batu bara: Tiongkok membatalkan rencana pembangkit listrik berbasis fosil baru dan segera menonaktifkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada, sementara India mempertimbangkan untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara setelah tahun 2022 (United Nations Climate Change, 2017).

Dengan menggunakan energi terbarukan yang lebih besar, termasuk tenaga air serta energi nuklir, dan peralihan bertahap ke kendaraan

bertenaga listrik sehingga lebih hemat energi di seluruh sistem ekonomi mereka, ada kemungkinan bahwa Tiongkok dan India sudah dapat mencapai tujuan pembangunan mereka dan masih dapat menurunkan emisi ke target yang disepakati secara umum. Kedua negara ini telah mengejar strategi bersama dengan yang paling berkembang diantara negara-negara yang sedang bekerja sejauh ini, salah satunya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang harus dilakukan oleh negara-negara industri. Tiongkok dan India juga membuat pengumuman untuk secara sukarela mengurangi intensitas karbon mereka dengan tujuan pengurangan emisi gas kedua negara ini (Siddiqi, 2011).

Selain Energi Terbarukan, Tiongkok dan India juga memutuskan untuk menggunakan batu bara bersih di tempat mereka melalui pembangkit listrik tenaga matahari, meskipun dengan kesuksesan yang bervariasi mengingat konsumsi di India dan Tiongkok bergantung pada batu bara. Di India tantangannya berada pada tingkat teknologi kualitas batu bara yang rendah dan pembangkit listrik tenaga batu bara tidak menggunakan teknologi bersih, Di sisi lain. Tiongkok tantangannya adalah pada tataran pemerintahan, yang diantaranya adalah *balancing* yang saling bertentangan. Berbagi pengetahuan dan transfer teknologi antara India dan Tiongkok, dalam hal ini wilayah mereka akan saling menguntungkan. India dapat memperoleh keuntungan dari pengalaman Tiongkok dan produsen teknologi batu bara bersih dan Tiongkok akan mendapatkan akses ke pasar India yang lebih luas (Bharadwaj, 2017).

3.1.2 KERJA SAMA TIONGKOK DAN UNI EROPA

Uni Eropa merupakan pelopor dan pemimpin rendah karbon paling awal dan paling lama dalam pembangunan telah menetapkan standar internasional untuk mengatasi aksi perubahan iklim. Melihat Uni Eropa dan Upaya Tiongkok untuk mengatasi perubahan iklim menunjukkan banyak kesamaan dan kepentingan diantara keduanya. Keduanya percaya bahwa perlu tindakan yang diambil untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan keduanya menetapkan tujuan yang mengesankan untuk direalisasikan. Mewakili dua dari entitas geopolitik paling berpengaruh di dunia, serta dua ekonomi terbesar diukur dalam paritas daya beli, Kerja sama Uni Eropa dan Tiongkok secara berkelanjutan akan dilakukan dengan kontribusi dan signifikan bagi kemajuan rezim iklim global yang efektif (Liu & Wu, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa dan Tiongkok telah memperdalam dan memperluas keterlibatan mereka dalam perdagangan dan investasi, serta dalam hubungan diplomatik dan politik. Kerja sama Uni Eropa dan Tiongkok dalam masalah iklim dimulai dari sektor energi sudah dimulai pada tahun 1994, yang mencakup isu-isu seperti energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi batu bara bersih dan teknologi di sektor energi. Dialog antara Uni Eropa dan Tiongkok dalam masalah lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pencemaran air dan udara diluncurkan pada tahun 1996 lalu dan ditingkatkan menjadi kegiatan tingkat Menteri pada tahun 2003 hingga pertemuan puncak pada bulan September 2005. Sejak saat itu, dialog perubahan iklim dilembagakan

dalam KTT bilateral, dan perubahan iklim telah menjadi inti dari pertemuan hubungan bilateral (Liu & Wu, 2014).

Kerja sama Uni Eropa-Tiongkok mengenai perubahan iklim telah dilakukan dalam beberapa bidang utama. Pertama yaitu, Proyek *Clean Development Mechanism* (CDM). Pada tahun 2007, Komisi Eropa menginvestasikan 2,3 juta euro dan meluncurkan “CDM EU-China Proyek Fasilitasi” untuk memperkuat dan meningkatkan kerangka CDM di kedua negara. Uni Eropa adalah investor utama dalam proyek CDM dan pembeli pengurangan emisi bersertifikat, sedangkan Tiongkok adalah pemasok utamanya. Proyek fasilitasi ini memainkan peran penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca di Tiongkok. Pada tahun 2009, 53% kredit karbon di Tiongkok dibeli oleh perusahaan Uni Eropa. Kedua, Proyek Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS). Proyek ini diharapkan bisa mengembangkan dan mendemonstrasikan teknologi CCS di Uni Eropa dan Tiongkok. Uni Eropa dan Tiongkok juga telah menandatangani kerja sama MoU tentang teknologi pembangkit listrik *Near Zero Emission Coal* (NZEC) melalui CCS untuk meluncurkan proyek tahap kedua. Proyek ini masih dalam tahap percobaan. Ketiga, Energi Bersih. Pusat energi bersih Uni Eropa-Tiongkok diluncurkan pada tahun 2010 dan ditunjukkan untuk mempromosikan pengembangan energi bersih di Tiongkok melalui kerja sama teknologi, layanan konsultasi kelembagaan, dan pengembangan kapasitas. Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam produksi panel surya dan turbin angin, hubungan ekonomi Uni Eropa-Tiongkok semakin ditentukan oleh perdagangan terkait energi bersih. Uni Eropa adalah pasar

utama untuk komponen tenaga surya dan angin yang dibuat oleh Tiongkok. Pada tahun 2012, 75% komponen solar dan 40% komponen tenaga angin di impor oleh negara anggota Uni Eropa berasal dari Tiongkok (Liu & Wu, 2014).

Hingga pada Juli 2017 Tiongkok dan Uni Eropa menegaskan kembali komitmen mereka terhadap *Paris Agreement* dalam pernyataan bersama mereka dalam KTT Uni Eropa-Tiongkok yang diadakan di Beijing. Para pemimpin menyoroti pentingnya menangani perubahan iklim dan meminta negara lain untuk ikut meningkatkan aksi iklim. Upaya ini menjadi lebih mendesak dari sebelumnya karena efek perubahan iklim semakin memburuk. Para pemimpin menyatakan komitmen mereka untuk memajukan kerja sama dalam implementasi *Paris Agreement* dan mendukung penuh konferensi perubahan iklim PBB (COP24) yang akan dilaksanakan di Katowice, Polandia. Presiden komisi Eropa Jean Claude Juncker mengatakan bahwa mereka telah menggarisbawahi tekad bersama untuk melawan perubahan iklim dan menunjukkan kepemimpinan global. Hal ini juga menunjukkan komitmen bersama mereka terhadap multilateralisme dan mengakui bahwa perubahan iklim adalah tantangan global yang mempengaruhi negara di bumi dan tidak ada lagi waktu hanya untuk duduk dan menonton secara pasif, tetapi melakukan tindakan secara tegas (United Nations Climate Change, 2018).

Terkait dengan penanggulangan perubahan iklim, pernyataan Presiden komisi Eropa sebagai promosi transisi energi bersih dan rendah karbon global terutama menuju layanan energi yang berkelanjutan, terjangkau,

andal, dan modern. Para pemimpin juga mengungkapkan dukungan bersama mereka untuk bidang-bidang penting lainnya dalam melakukan penanggulangan perubahan iklim. Berdasarkan prinsip penghormatan, kepercayaan, kesetaraan, dan saling menguntungkan para pemimpin sepakat untuk lebih memperdalam kemitraan mereka untuk perdamaian, pertumbuhan, reformasi, dan peradaban dengan menerapkan agenda strategis kerjasama Uni Eropa-Tiongkok mulai 2017 dan berjalannya hingga 2020 secara komprehensif (United Nations Climate Change, 2018). Pada tahun 2020, sebelum Xi Jinping memberikan pengumuannya terkait target penurunan emisi sebesar 1,5 derajat celcius, Tiongkok dan Uni Eropa mengadakan pertemuan tingkat pemimpin yang berfokus pada serangkaian masalah prioritas dalam mengatasi perubahan iklim. Uni Eropa dan Tiongkok menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisi lagi pada tahun 2025 dan mencapai nol bersih pada tahun 2060. Dengan melakukan tekanan ini dapat dipercaya untuk bisa mengadopsi penyesuaian karbon untuk melindungi industri negara karena memperkuat target mereka sendiri. Uni Eropa dan Tiongkok akan mampu bekerja sama untuk meningkatkan biaya diplomatik dan ekonomi mereka. Melalui perubahan iklim juga telah meningkatkan agenda diplomatik dari beberapa anggota Uni Eropa dan Tiongkok untuk memperkuat kerja sama (Herz, 2020).

Bidang kerja sama Uni Eropa-Tiongkok dalam mengatasi perubahan iklim adalah dengan kota rendah karbon. Untuk menyempurnakan kerja sama bilateral Uni Eropa-Tiongkok dalam hal administrasi dan tingkat nasional, sejumlah kota di Tiongkok telah bermitra dengan kota-kota negara

anggota Uni Eropa untuk mempromosikan pertukaran kebijakan, perencanaan dan praktik baik untuk rendah karbon, pembangunan dan ketahanan iklim. Keterlibatan Eropa telah banyak terjadi dalam membantu program perubahan iklim nasional Tiongkok dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk ikut beradaptasi dalam proyek kota ramah lingkungan rendah karbon di Tiongkok seperti di Qingdao (mitra Jerman), Tangshan-Caofeidian dan Wuxi (mitra Swedia), Shanghai-Chongming-Dongtan (Mitra Inggris), Beijing-Mentougou (Mitra Finlandia), Shenzhen-Longgang-Pingdi (Mitra Belanda) dan Wuhan-Caidian (Mitra Prancis). Demikian pula dengan kerja sama Uni Eropa dan Institut Nasional Tiongkok untuk standarisasi secara langsung mempengaruhi efisiensi sistem pelabelan yang diterapkan pada peralatan listrik Tiongkok yang secara ketat mengikuti petunjuk Desain Rumah Ramah Lingkungan Eropa. Hubungan bilateral dan kerangka kelembagaan ini penting untuk dilakukan dalam memfasilitasi pertukaran dan pemahaman, untuk mengurangi kesalahpahaman dan bekerja sama menuju kerja sama yang konstruktif (Liu & Wu, 2014).

Untuk mencapai tujuan kerja sama Uni Eropa-Tiongkok pada tahun 2020, Uni Eropa dan Tiongkok mengembangkan dan mendemonstrasikan untuk Uni Eropa dan Tiongkok maju, mendekati nol teknologi emisi batubara melalui penangkapan dan penyimpanan karbon. Uni Eropa dan Tiongkok akan mengambil tindakan untuk mendorong pengembangan teknologi rendah karbon, penyebaran dan akan bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi menjadi pilihan energi yang terjangkau. Uni

Eropa dan Tiongkok juga akan mengeksplorasi masalah pembiayaan termasuk dalam sektor swasta, usaha patungan, kemitraan publik swasta, dan peran potensial dari pembiayaan karbon dan kredit ekspor. Kedua negara ini akan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan penguatan kapasitas institusi, termasuk melalui peningkatan kesadaran publik, pertukaran personel dan pelatihan (European Union, 2005).

Manfaat yang dirasakan oleh Tiongkok dalam keterlibatan *Paris Agreement* dengan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam kerangka inisiatif seperti the *Clean Energy Ministerial* yang menyangkut solar PV (Fotovoltaik) yang menggunakan panel surya dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik terus mengalami peningkatan. Komisi Eropa mengumumkan pembatasan perdagangan yang diperkenalkan pada tahun 2003 dan telah berakhir pada 3 September 2018. Tiongkok menyambut langkah tersebut sebagai diplomasi perdagangan yang sukses (Clean Energy Wire, 2018).

Tiongkok merupakan negara produsen solar PV terbesar di dunia. Solar PV sebagai cara Tiongkok untuk menggunakan tenaga surya sebagai alat pembangkit listrik. Sejak bergabungnya Tiongkok ke WTO pada 11 Desember 2001, WTO dipandang sebagai wadah akselerator untuk industri Tiongkok dan mendapat akses yang lebih mudah ke pasar terbuka. Tiongkok saat ini mengambil peran dominan dalam produksi PV di dunia dan menggeser posisi Jepang yang sempat menjadi produsen solar PV terbesar di dunia. Solar PV memainkan peran penting yang menjadi dasar bagi target pengurangan karbon yang diberlakukan pada masing-masing

negara yang meratifikasi *Paris Agreement*. Peningkatan permintaan solar PV dijadikan sebagai peluang Tiongkok untuk menarik banyak investasi dalam industri dan teknologi terbarukan seperti solar PV, mengingat solar PV memainkan peran penting menjadi dasar bagi target pengurangan karbon yang diberlakukan pada masing-masing pihak yang meratifikasi *Paris Agreement* (Wehrmann, 2016).

3.1.3 KERJA SAMA TIONGKOK DAN BRAZIL

Keterlibatan hubungan Tiongkok dan Brazil sebagian besar didorong oleh perhitungan keamanan energi dan berfokus pada prinsip *Belt and Road Initiative* (BRI), termasuk fasilitasi perdagangan melalui investasi transportasi. Brazil mengejar jalur pembangunan hijau yang semakin berkelanjutan, demikian pula dengan perusahaan Tiongkok yang memiliki posisi yang sangat baik untuk memenuhi permintaan sebagai investor terkemuka di energi terbarukan. Pangsa angin dan matahari dalam tenaga luar negeri Tiongkok dalam investasi relatif terbatas dibandingkan dengan batu bara, gas, dan tenaga air yang kemungkinan bisa meningkat. Tiongkok juga sudah berinvestasi lebih ekstensif dalam proyek tenaga surya dan angin dengan Brazil. Tiongkok telah memfokuskan aktivitas terkait infrastrukturnya pada sektor energi Brazil. Misalnya pada akuisisi tenaga air dan konstruksi saluran transmisi listrik, dan akuisisi sekaligus berinvestasi pada *greenfield* dalam infrastruktur pelabuhan. Peluang baru bagi kedua negara ini untuk terlibat dalam pengembangan energi hijau di Brazil dan menarik perusahaan di Tiongkok (Stuart & Myers, 2017).

Investasi energi hijau Tiongkok di Brazil telah terjadi pada tingkat yang cukup besar. Sebagai hasil dari investasi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, Perusahaan Tiongkok saat ini memiliki 16 persen dari kapasitas tenaga angin Brazil dari 21 persen kapasitas matahari. Brazil memprioritaskan keterlibatan asing lebih lanjut di sektor-sektor ini untuk menarik kesetaraan lebih banyak investasi dari perusahaan Tiongkok maupun negara lain. Komitmen Tiongkok untuk mengatasi perubahan iklim juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan kolaborasi keberlanjutan dengan Brazil. Pada September 2020, dalam forum PBB, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengisyaratkan bahwa Tiongkok semakin tertarik untuk memainkan peran penting dalam menangani perubahan iklim global. Brazil dan Tiongkok memiliki kesempatan unik yang sama untuk mempromosikan agenda perubahan iklim secara keberlanjutan. Perusahaan dari Bank Tiongkok telah mempertimbangkan dampak ekstensif dari infrastruktur, seperti investasi pertanian dan perdagangan yang berfokus pada komoditas di modal alam Brazil (Stuart & Myers, 2017).

Forum tingkat tinggi Tiongkok mengenai *south-south cooperation* (SSC) dikombinasikan dengan kegiatan reboisasi kerangka REDD+ Brazil yang diselenggarakan pada November 2017. Kementerian lingkungan hidup Tiongkok bekerja sama dengan badan kerja sama Brazil untuk mengintegrasikan struktur kementerian luar negeri dengan pengembangan program *south-south cooperation* dalam perubahan iklim dan penanggulangan hutan. Program ini bertujuan untuk menghasilkan solusi untuk tantangan bersama, memperkuat kapasitas kelembagaan, teknis dan

ilmiah, dan mempromosikan keterlibatan negara berkembang dalam memobilisasi sumber daya untuk hasil REDD+. Dana Amazon dan dana perubahan iklim nasional adalah instrumen utama Brazil untuk mendanai aksi mitigasi terkait REDD+. Untuk memberikan gambaran mengenai peran penting dan potensi dari *south-south cooperation*, *United Nations Southern Climate Partnership Incubator* (SCPI) juga merilis laporan mengenai *climate partnership* mengenai perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan (United Nations Climate Change, 2017).

Kerja sama dalam bidang lingkungan antara Tiongkok dan Brazil telah termotivasi oleh isu-isu yang mempengaruhi seluruh dunia seperti keberlanjutan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan keamanan air. Agenda perubahan iklim tentunya menjadi isu yang menentukan dalam dialog politik ekonomi yang lebih erat antar kedua negara ini. Untuk menggabungkan jalur lingkungan dan pembangunan dalam koalisi negara ini, penting bagi Tiongkok dan Brazil untuk dapat mempertimbangkan kepentingan bersama yang dapat mengarah pada hubungan yang nyata dan efektif dengan lingkungan dan harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan baik di dalam maupun luar negeri. Jalan kedua negara ini dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dilakukan dengan memulihkan hutan dan meningkatkan dekarbonisasi. Tiongkok dan Brazil juga melakukan kerja sama dengan beralih dari energi yang diperoleh dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan, dan memasukkan produk dari industri pertanian tropis rendah karbon Brazil untuk dapat memasuki pasar makanan Tiongkok (Teixeira, 2019).

Untuk memainkan peran penting dalam mempromosikan solusi baru dalam pembangunan hijau, kedua negara ini bekerja sama dalam melakukan ketahanan pangan dan energi, kualitas hidup di kota, sanitasi, infrastruktur berkelanjutan, transportasi, serta bioekonomi terdapat banyak peluang untuk memajukan kepentingan bersama Tiongkok dan Brazil dengan melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga keamanan air dan konservasi keanekaragaman hayati. Kedua negara ini memproduksi protein hewani dengan dampak lingkungan yang lebih rendah sekaligus melestarikan dan memulihkan sumber daya hayati. Pembangunan berkelanjutan juga dapat menambah nilai bagi Tiongkok dan Brazil. Pada tahun 2020, Tiongkok akan menjadi tuan rumah konferensi para pihak konvensi keanekaragaman hayati. Hal ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Tiongkok dan Brazil untuk menawarkan kepada dunia pandangan politik baru mengenai hubungan mengatasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan individu kolektif. Hubungan ini akan menawarkan kesempatan baik untuk kerja sama Tiongkok dan Brazil (Teixeira, 2019).

3.2.4 STRATEGI PEMBANGUNAN HIJAU DALAM KEBIJAKAN *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI) TIONGKOK

Pembangunan hijau adalah bagian penting dalam kebijakan BRI Tiongkok. Dalam visi dan tindakan bersama Tiongkok mempromosikan kemajuan ekologi dalam melakukan investasi dan perdagangan, meningkatkan kerja sama dalam melestarikan lingkungan hijau, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengatasi perubahan iklim. Inti dari *Green*

Belt and Road ini adalah untuk mengintegrasikan pembangunan hijau dan ekologi dalam perlindungan lingkungan menjadi setiap aspek pengembangan BRI pada prinsip konservasi energi dan perlindungan lingkungan di bawah pedoman peradaban ekologi dan konsep pembangunan hijau. Sebagai inisiatif utama yang mendorong pembangunan ekonomi BRI telah dikenal luas oleh komunitas internasional sebagai sebuah solusi penting untuk mengimplementasikan agenda pada tahun 2030. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjukkan bahwa pada tahun 2030 agenda pembangunan berkelanjutan BRI memiliki kesamaan dengan tujuan yang ambisius. Dalam melakukan pembangunan hijaunya, Tiongkok memiliki platform kemitraan internasional untuk memungkinkan pembangunan ini menjadi lebih baik. Untuk menjalankan pembangunan hijau ini, Kementerian lingkungan PBB dan Kementerian ekologi dan lingkungan telah mengusulkan untuk membentuk koalisi internasional dalam pembangunan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BRI dalam tata kelola lingkungan (CCICED, 2018).

Pembangunan Hijau BRI Tiongkok juga membangun platform internasional untuk bertukar ide, kebijakan dan praktik dalam menyelenggarakan lokakarya dan dialog. Pada Mei 2017, Presiden Xi Jinping mengusulkan untuk membentuk koalisi Internasional dalam pembangunan hijau BRI-nya. Koalisi ini diprakarsai bersama oleh Kementerian lingkungan Hidup PBB dan Kementerian lingkungan dan ekologi Tiongkok. Ini adalah jaringan internasional yang terbuka, inklusif dan sukarela yang mengintegrasikan pembangunan hijau ke dalam proses

pembangunan BRI. Kontribusi potensial dari pembangunan hijau BRI secara aktif ikut berkontribusi pada kebijakan pengurangan emisi Tiongkok untuk tahun 2030. Pada tahun 2015, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dalam *Paris Agreement* menawarkan peta jalan untuk era baru pembangunan berkelanjutan. Presiden Xi Jinping mengusulkan untuk mengejar visi baru dalam pembangunan hijau dan cara kerja pembangunan hijau serta rendah karbon (CCICED, 2018).

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh agenda 2030, Tiongkok melakukan pembangunan berkelanjutan dengan membangun jalur sutra sesuai dengan tren pembangunan hijau internasional dan konsisten pada agenda 2030 serta dalam *Paris Agreement*. Tiongkok melakukan promosi koordinasi dalam melakukan kebijakan perlindungan ekologi dan lingkungannya untuk penguatan kemitraan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dan pertukaran kebijakan ini secara efektif mempromosikan pengembangan kemitraan berkelanjutan antara BRI dan negara dan meningkatkan konsistensi kebijakan regional pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Kementerian ekologi dan Lingkungan Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian lingkungan PBB bekerja sama untuk pembentukan koalisi internasional dalam pembangunan hijau BRI yang mendapat tanggapan aktif dari komunitas internasional, organisasi internasional, dan negara-negara sepanjang jalur BRI (CCICED, 2018).

3.2.5 TIONGKOK DAN *PARIS AGREEMENT*

Tiongkok menerapkan target rendah karbonnya melalui INDC-nya dalam *Paris Agreement*. Tujuan negosiasi perubahan iklim untuk mengembangkan tanggapan dan solusi global yang adil, rasional dan efektif. Dengan bergabungnya Tiongkok dengan *Paris Agreement* Tiongkok mengusulkan berbagai model pengembangan dalam tata global masa depan. Tiongkok juga mempromosikan implementasi *Paris Agreement* dan menetapkan tindak lanjut yang berfungsi sebagai pedoman Tiongkok untuk aktif dan berpartisipasi secara konstruktif dalam mekanisme perkembangan global secara bertanggung jawab. Tiongkok telah berkomitmen untuk mengimplementasikan *Paris Agreement* sehingga hal tersebut mempromosikan integrasi perubahan iklim ke Tiongkok sebagai inisiatif ekologis dalam formasi trans sosial-ekonomi menuju ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim. Upaya Tiongkok untuk menyukseskan *Paris Agreement* yang dianggap sebagai model untuk kesuksesan dan partisipasi aktif Tiongkok dalam pemerintahan Internasional (Yun, 2016).

Sebagai negara penghasil karbon terbesar di dunia dan bertanggung jawab untuk perkembangan emisi global masa depan, Tiongkok memperkuat target dengan melangkah lebih jauh ke target 2 derajat dan Tiongkok membutuhkan pemotongan lebih banyak lagi. Hal ini tentu menjadi tantangan yang besar bagi Tiongkok. Namun pada akhirnya Tiongkok menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi kekhawatiran negara-negara yang paling rentan untuk dibuat 1,5 derajat dalam kesepakatan terakhir. Kekhawatiran mengenai berbagai macam tekanan

lingkungan dan perubahan iklim dampaknya telah memicu tekad Tiongkok untuk meningkatkan efisiensi dan pemotongan energi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan dari energi bersih untuk membantu peralihannya ke ekonomi hijau rendah karbon. Lebih khusus lagi, pemerintah Tiongkok menetapkan absolut batas konsumsi energi 5 miliar ton, setara dengan batubara standar pada tahun 2020, dan berusaha membatasi konsumsi batu bara hingga mencapai puncaknya periode tahun 2016-2020. Kemudian mengurangi konsumsi batu bara secara absolut di daerah yang tercemar, dan mengambil langkah untuk menjaga konsumsi energi dan emisi karbon terkendali di industri dan kota yang mengonsumsi energi (Zhang Z. , 2016).

Cara yang dilakukan Tiongkok untuk menunjukkan ambisi nya dalam dalam penanganan emisi adalah menyarankan emisi karbon Tiongkok memuncak selama tahun 2020 dan kembali ke bawah tingkat pada tahun 2030 sampai 2040. Hal tersebut didanai oleh Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok yang bertujuan untuk mencapai puncak emisi karbon dibawah tingkat 11 Gt CO₂ selama periode 2025-2030. Tsinghua-MIT menunjukkan bahwa emisi gas karbon Tiongkok akan mencapai puncaknya pada 12,1 Gt CO₂ sekitar tahun 2040 dan berkelanjutan pada 10,2 Gt CO₂ sekitar tahun 2030. Bahan bakar non-fosil dapat berkontribusi setidaknya 25% dari total penggunaan energi pada tahun 2030. Masih adanya kesenjangan emisi yang signifikan dalam memenuhi tujuan ini. Jika Tiongkok menetapkan target emisi yang ketat untuk tahun 2020, dan pihak-pihak Paris Agreement menyepakati, maka Tiongkok mengungkapkan tingkat emisi karbonnya untuk tahun 2030 dan dikirimkan melalui INDC.

Target untuk tahun 2025 akan membantu menghindari risiko emisi yang tidak memadai selama lima belas tahun. Jika bisa disepakati, maka tujuan itu untuk tahun 2030 akan bisa ditetapkan pada tahun 2020 (Zhang Z. , 2016)

3.3 CONSEQUENCES

Dalam konsep *Consequences*, kebijakan alternatif yang diambil oleh negara memiliki manfaat dan hambatannya masing-masing. Untuk menganalisis *consequences* dari alternatif yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat *cost, benefit and constraints* dari setiap kebijakan dalam alternatif kerja sama. Aktor negara memilih alternatif yang dirasa dapat membawa hasil yang bisa mengoptimalkan kepentingannya secara obyektif sehingga alternatif yang dipilih memberikan manfaat bagi aktor tersebut. Selain manfaat juga terdapat kekurangan dan hambatan. Kendala dapat membuat beberapa kemungkinan alternatif menjadi tidak mungkin. Kendala juga dapat mengubah *cost and benefit* dari alternatif. Aktor akan dianggap rasional ketika mereka memiliki alasan kuat untuk percaya apa yang mereka yakini, dan melakukan apa yang mereka lakukan. Alasan ini secara realistis dapat diperlakukan sebagai kesepakatan antara *cost and benefit* dari tindakan alternatif (Boudon, 1988).

3.3.1 COST, BENEFIT AND CONSTRAINTS KERJA SAMA TIONGKOK DAN INDIA

Kerja sama Tiongkok dan India dalam masalah energi dan perubahan iklim telah ditingkatkan melalui pemain swasta. Ketersediaan

keuangan yang lebih murah dengan tingkat bunga yang lebih rendah untuk sektor energi terbarukan Tiongkok bisa menjadi insentif untuk India. *Cost* dalam kerja sama Tiongkok-India ada dengan melakukan *South-South Cooperation Climate Fund* dari pemerintah Tiongkok sebagai tempat penting untuk dilihat dalam meningkatkan kerja sama bilateral. Pada 25 September 2015, Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa Tiongkok akan menawarkan USD 3,1 miliar untuk dana tersebut. Menghidupkan kembali model di energi terbarukan bagi India, industri energi terbarukan pemerintah Tiongkok telah terhubung sangat terkait sehingga infrastruktur yang buruk dan kurangnya keuangan tidak menghalangi proses. Dalam proses ini, penting bagi negara untuk menyediakan mekanisme ganti rugi yang cepat, melonggarkan kekakuan dalam perjanjian kontrak, dan menciptakan kumpulan pembiayaan jangka panjang untuk sektor ini. Hal ini masuk dalam beberapa bidang termasuk reformasi sektor energi, dan pembangunan keuangan berkelanjutan (Bharadwaj, 2017).

Tiongkok dan India memiliki kebutuhan dan harapan yang sama untuk keamanan energi dan mitigasi iklim negaranya. Mereka juga memulai proyek bersama untuk berbagi praktik terbaik dengan negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Eropa untuk melengkapi strategi domestik mereka. *Benefit* dari kerja sama bilateral negara ini terdapat dalam beberapa bidang kerja sama dalam kebijakan, program, dan teknologi mitigasi pembangunan yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Kedua negara ini sama-sama mengeksplorasi teknologi solusi rendah karbon yang dapat mendorong ekonomi mereka yang tumbuh cepat. Dengan

hal ini manfaat yang didapat Tiongkok dan India, mereka bisa mengatasi masalah emisi karbon secara bersamaan dan mendapat manfaat dari bidang ekonomi yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 Tiongkok dan India juga meningkatkan tingkat investasi dan perdagangan antara kedua negara untuk mendirikan Kawasan industri Photo Voltaic (PV) yang terintegrasi di Zona Ekonomi Khusus Mundra (SEZ) dan patungan untuk membangun energi hijau terbarukan Tiongkok *Golden Concord Holdings* dan kesepakatan ini bernilai hingga USD 3 miliar (Bharadwaj, 2017).

Kerja sama antara Tiongkok dan India sebagai dua negara berkembang terbesar sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim. Kerja sama bilateral juga akan membantu kedua negara ini menuju pencapaian komitmen iklim mereka. Tetapi sebagian besar tantangan juga berasal dari bagian implementasi kerja sama bilateral. *Constraints* kerja sama Tiongkok dan India dalam upaya kedua negara menghadapi perubahan iklim dan lingkungan. Banyak masalah terkait kerja sama bilateral dalam hal energi terbarukan yang dirasa belum dieksplorasi dan dilaksanakan secara memadai. India dan Tiongkok harus membangun strategi berdasarkan kumpulan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Hal ini juga bertujuan agar kedua negara ini dapat membantu menciptakan peluang bisnis dan memfasilitasi pasar berkelanjutan. Dalam laporan IPCC juga menyimpulkan bahwa kedua negara ini menghadapi ancaman degradasi ekologi, kelangkaan makanan dan air, pergeseran pertanian, dan bahaya kesehatan. Sehingga masih banyak tantangan yang perlu dihadapi kedua

negara yang sedang sama-sama berjuang menghadapi perubahan iklim (Bharadwaj, 2017).

3.3.2 COST, BENEFIT AND CONSTRAINTS KERJA SAMA TIONGKOK DAN UNI EROPA

Sebagai sesama negara penghasil emisi gas rumah kaca, Tiongkok dan Uni Eropa memperkuat kerja sama bahkan menjadi investor di bidang energi terbarukan. *Cost* dari kerja sama kedua negara ini membuat proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) yang di mana Komisi Eropa menginvestasikan 2,3 juta euro dan meluncurkan CDM UE-Tiongkok sebagai proyek fasilitasi untuk memperkuat dan meningkatkan kerangka CDM diantara kedua negara. Uni Eropa sebagai investor utama dalam proyek CDM dan pembeli pengurangan emisi bersertifikat sedangkan Tiongkok sebagai pemasok utama. Proyek selanjutnya adalah penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Proyek ini bertujuan untuk menangkap dan menyimpan emisi CO₂ dari pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2020. Proyek *Near Zero Emission Coal* (NZEC) menjanjikan 57 juta euro untuk demonstrasi dan evaluasi CCS dalam kerja samanya dengan Tiongkok. Proyek energi bersih Uni Eropa dan Tiongkok sebagai hubungan utama dari kerja sama kedua ini karena hubungan ekonomi semakin ditentukan oleh perdagangan terkait energi bersih. Proyek terakhir adalah kota rendah karbon. Proyek tersebut diperkuat dengan kontribusi 10 juta euro dari Uni Eropa. Selain itu Tiongkok juga telah mendapat kesempatan untuk menggunakan sebagian dari dana yang disediakan. Proyek energi bersih ini juga didukung oleh program kerja Sama lingkungan utama Uni

Eropa dan Tiongkok yaitu *River-Basin*, Program Manajemen dengan kontribusi Uni Eropa sebesar 25 juta euro dan Program Keanekaragaman Hayati dengan kontribusi Uni Eropa Sebesar 30 juta euro. Sehingga dalam proyek ini membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan (Liu & Wu, 2014).

Benefit dari kerja sama Tiongkok dan Uni Eropa terfokus pada keuntungan ekonomi. Dalam hal ini Uni Eropa secara alami merupakan teladan bagi Tiongkok. Emisi Uni Eropa berkurang sebesar 22% dan sementara ekonomi tumbuh 50% pada periode yang sama. Tiongkok juga tertarik belajar dari Uni Eropa dan mendapatkan bantuan dalam teknologi pembangunan rendah karbon untuk memenuhi kebutuhannya yang tinggi akan bersih dan untuk memfasilitasi dari ekonomi padat karya yang didukung oleh teknologi. Selain itu Uni Eropa sebagai ekonomi berteknologi maju, Tiongkok akan menjadi pasar ekspor terbesar untuk teknologi dan layanan bersihnya. Uni Eropa menjadi pelopor dalam bidang energi terbarukan hingga 44% dari dunia bersih dan Tiongkok telah mengimpor sekitar 30.000 teknologi dari Uni Eropa yang diantaranya adalah teknologi energi bersih yang menyumbang porsi secara signifikan. Perdagangan dan pasar investasi untuk produk energi rendah karbon kemungkinan besar bernilai paling tidak \$ 500 miliar per tahun sebagai keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak (Liu & Wu, 2014).

Constraints bagi hubungan kerja sama Tiongkok dan Uni Eropa tidak hanya masalah kebijakan lingkungan tetapi juga kebijakan industri dan kebijakan sosial. Terdapat tiga aspek dari kendala tersebut, Pertama masalah perbedaan Politik dan Budaya. Dalam *The Spirit of Laws* dari Montesquieu

mengenai kebebasan berpolitik, *check and balances* dan pemisahan kekuasaan telah mempengaruhi Eropa dalam moralitas publik dan harapan terhadap pemerintahan yang baik. Selain dianggap sistem politik komunis, tradisi administrasi Tiongkok dibangun di atas Yayasan konfusianisme dan legalis kuno yang tertanam dalam yang mempromosikan nilai-nilai politik terkadang bertentangan secara diametric dengan nilai-nilai kekuasaan dan otonomi individu. Ketegangan akibat perbedaan budaya dan politik, kemauan dan kemampuan diantara para pemain Eropa untuk menginvestasikan sejumlah besar uang dan kemauan dan kemampuan terbatas para pemain Tiongkok untuk membayar konsultasi layanan dan pengetahuan kesalahpahaman keduanya mengenai nilai hubungan pribadi jangka panjang dalam berbisnis dihabiskan untuk memahami kompleksitas konteks budaya Tionghoa. Kendala kedua yaitu konflik ekonomi. Tiongkok beralih dari model ekonomi pembangunan berdasarkan ekspor barang-barang manufaktur padat karya yang menempatkan perusahaan Tiongkok bersaing langsung dengan bisnis Eropa. Meningkatnya daya saing pabrik Tiongkok dianggap oleh negara-negara Barat sebagai “dumping” yang menyebabkan konfrontasi yang terjadi antara Uni Eropa dan Tiongkok (Liu & Wu, 2014).

Batasan volume ekspor dan tunjangan bebas bea untuk ekspor perusahaan Tiongkok pada Februari 2017, Eropa memutuskan untuk sepenuhnya menghapus bea anti-dumping, ketidaksepakatan tentang perdagangan bilateral masih ada dan menciptakan risiko bahwa perselisihan semacam itu dapat merembes ke dalam dan merusak kolaborasi perubahan

iklim. Kendala ketiga yaitu alih teknologi. Perbedaan politik dan kebijakan serta ekonomi yang saling bertentangan, kepentingan Uni Eropa dan Tiongkok pada isu sentral dalam kemitraan bilateral perubahan iklim Uni Eropa dan Tiongkok menjadi masalah. Tiongkok lebih memiliki pendekatan yang direncanakan secara terpusat dalam kerangka kerja UNFCCC sementara Uni Eropa memilih pendekatan yang lebih terdesentralisasi pada pasar. Masalahnya juga terletak pada Uni Eropa yang ditunjukkan oleh perusahaan Eropa dalam laporan proyek fasilitasi CDM Uni Eropa-Tiongkok adalah kurangnya intensif ekonomi dan dukungan politik untuk transfer ke Uni Eropa. Kerja sama ini akan sulit dilakukan jika Uni Eropa dan Tiongkok tidak mampu menyiapkan dengan jelas kerangka kerja untuk mempromosikan transfer teknologi (Liu & Wu, 2014).

3.3.3 *COST, BENEFIT AND CONSTRAINTS* KERJA SAMA TIONGKOK DAN BRAZIL

Realisasi potensi penggalangan dana Brazil membutuhkan upaya yang cukup besar dalam membangun kepercayaan diantara mitra internasional, termasuk dengan menghentikan kegiatan yang banyak menguras modal alam negara. Hal ini juga membutuhkan reorientasi Tiongkok dan Brazil dalam membangun hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan hijau yang tetap berfokus pada industri pertanian pada pembangunan yang terkadang tidak dapat dipertahankan secara lingkungan infrastruktur untuk mendukungnya. *Cost* kerja sama Tiongkok dan Brazil didukung oleh proyek-proyek dalam bidang energi terbarukan, transportasi, pengelolaan limbah padat, dan industri efisiensi energi. Untuk membuat

jalur proyek berkelanjutan dan instrument keuangan pembangunan hijau, kedua negara ini terutama Brazil berpotensi akan menghasilkan \$ 1,3 triliun untuk mendukung kredit baru termasuk obligasi hijau untuk mendukung proyek-proyek yang akan dijalankan. Tetapi proyek-proyek tersebut belum seutuhnya dijalankan oleh kedua negara ini dan keuntungan pembangunan hijau masih lebih besar dihasilkan oleh Brazil (Studart & Myers, 2017).

Benefit dari kerja sama ini terdapat prospek yang cukup besar untuk agenda pembangunan hijau Tiongkok dan Brazil yang berorientasi pada keberlanjutan yang memajukan ekonomi kedua negara dengan lebih baik dengan menjunjung tinggi komitmen lingkungan hijau. Pemerintahan Tiongkok dan Brazil memprioritaskan keberlanjutan yang memiliki banyak keuntungan dengan mengadopsi komitmen bersama terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Melalui produksi dan keanekaragaman hayati juga dapat menghasilkan keuntungan yang jelas bagi produsen dan eksportir Brazil. Reorientasi hubungan akan banyak membantu kerja sama Tiongkok dan Brazil secara lebih luas dan akan menjadi perkembangan yang menjanjikan. Kedua negara ini juga akan mendapatkan banyak keuntungan dengan mengadopsi komitmen bersama tujuan bersama melalui kelestarian lingkungan. Melalui hal ini akan membantu Tiongkok dan Brazil dalam menghadapi tantangan yang lebih besar secara global untuk masalah iklim (Studart & Myers, 2017).

Constraints yang masih memisahkan hubungan Brazil dan Tiongkok termasuk dalam berbagai bentuk organisasi sosial dari kedua negara. Dari cara individu berinteraksi dan sedikit peluang jangka pendek

untuk mendapatkan keuntungan tinggi berdasarkan praktik perdagangan komoditas saat ini. Kurangnya saling ketergantungan menawarkan sedikit pertukaran substansial antara kedua negara. Kedua negara ini tidak boleh lagi dilihat sebagai bentuk dalam hambatan pembangunan tetapi harus menjadi bagian dari pilihan politik untuk menciptakan kerja sama yang lebih inklusif. Kedua negara ini juga harus mencari sinergi dalam agenda lingkungan untuk kepentingan masyarakat nasional maupun global dalam mengikuti jalur pembangunan. Sehingga jika adanya ketergantungan dari dua negara ini maka hambatan-hambatan yang ada dalam pembangunan bisa dilanjutkan dan bisa saling menguntungkan satu sama lain (Teixeira, 2019).

3.4 CHOICE

Dari berbagai kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Tiongkok, strategi pembangunan Hijau adalah yang paling efektif untuk kepentingan Tiongkok dalam bertahan di *Paris Agreement*. Kebijakan yang dibuat dengan negara lain juga sebagai salah satu bentuk kepentingan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan lingkungan negaranya. Namun, kebijakan tersebut masih kurang seimbang karena masih banyaknya kendala-kendala dan perbedaan kepentingan dari kerja sama yang dijalin. Sehingga strategi pembangunan hijau Tiongkok di BRI adalah yang paling efektif untuk Tiongkok dalam menjalankan kepentingannya. Dalam strategi tersebut juga terdapat target Tiongkok yang dimasukkan ke dalam target penurunan emisi INDC yang Tiongkok ajukan. Pembangunan hijau ini juga dibantu oleh Kementerian Lingkungan PBB yang ikut mendukung Tiongkok dalam

melakukan ambisinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk mempertahankan *Paris Agreement*.

Pilihan Tiongkok untuk bertahan dalam *Paris Agreement* ditentukan oleh motif lingkungan dan motif ekonomi politik. Motif lingkungan merupakan alat untuk membentuk dan meningkatkan kemauan individu atau aktor negara untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan. Lingkungan sebagai alasan yang mendasari perilaku individu atau negara untuk ikut terlibat dalam organisasi internasional, melainkan apabila lingkungan dijadikan sebagai alasan yang mendasari perilaku negara maka negara akan patuh terhadap motif lingkungan. Motif lingkungan ini dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap intensitas, kebijakan dan keseriusan negara dalam menangani masalah lingkungan. Motif ekonomi politik sebagai alasan yang mendasari perilaku atau negara untuk mengambil kebijakan. Maka motif ekonomi politik yang berorientasi pada lingkungan dijadikan sebagai perlindungan dari agenda ekonomi yang dimiliki negara lain dan politik sebagai pendukung dan pemberi solusi terhadap permasalahan sementara ekonomi menjadi perhatian utama dari pengambilan kebijakan suatu negara (Carter, 2007).

Manfaat yang dirasakan Tiongkok dalam keterlibatannya di *Paris Agreement* berhubungan dengan solar PV (Fotovoltaik) sebagai sektor teknologi dengan pengaplikasian panel surya dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Selain itu Tiongkok juga memperoleh pujian hanya dengan mendorong negara-negara lain untuk ikut memenuhi janji-janji dalam mereduksi emisi yang dilakukan dengan melakukan promosi

terhadap solar PV. Hal tersebut akan meningkatkan daya tarik solar PV Tiongkok juga mencari dominan pasar dalam teknologi energi bersih. Kepemimpinan Tiongkok dalam *Paris Agreement* dapat digunakan sebagai peluang Tiongkok untuk mempromisikan solar PV sebagai tujuan Xi Jinping dalam untuk mendapatkan reputasi Tiongkok secara Internasional (Xinhua, 2015).

Dalam pengambilan kebijakan rasional aktor ditentukan oleh penentuan aktor tunggal dan aktivitas pengambilan kebijakan menggunakan pertimbangan rasional aktor. Aktor tunggal dalam pengambilan kebijakan ini adalah Xi Jinping dimana Xi Jinping sebagai kepala negara mengeluarkan keputusannya untuk mempertahankan posisi Tiongkok di *Paris Agreement* sebagai bentuk kepentingannya mengurangi emisi juga mencari dominan pasar dalam teknologi bersih. Kemudian poin kedua adalah pengambilan kebijakan yang menggunakan untung rugi seperti yang dilakukan Tiongkok dalam melakukan kerjasama dengan beberapa negara untuk mempertingkatkan keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut. Kerjasama tersebut sebagai alternatif Tiongkok dalam pengambilan kebijakan, dari alternatif tersebut kemudian muncullah untung rugi sehingga aktor harus memutuskan secara rasional yang memberikan keuntungan. Keuntungan ini yaitu dari kerjasama Kementerian Lingkungan PBB dan Kementerian Lingkungan dan Ekologi Tiongkok dalam pembangunan hijau melalui kebijakan BRI.

Perubahan teknologi dan ekonomi jangka panjang menyebabkan Tiongkok yang pada akhirnya menunjukkan ambisi diplomatik yang lebih besar pada perubahan iklim. Setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari *Paris Agreement*, Tiongkok dapat menunjukkan ambisinya yang lebih besar untuk mengambil posisi kepemimpinan internasional mengenai perubahan iklim. Presiden Xi Jinping juga telah menggandakan dukungannya untuk kesepakatan iklim PBB pada transisi rendah karbon di negaranya. Xi Jinping juga menyebutkan bahwa *Paris Agreement* sebagai pencapaian yang diperoleh dengan susah payah, dan Tiongkok akan memenuhi kewajibannya tersebut di bawah kesepakatan iklim PBB. Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok berada di kursi penggerak dalam hal kerja sama internasional dalam perubahan iklim. Ini sebagai bentuk kebijakan Xi Jinping sebagai pemimpin baru pada tahun 2013 dengan mengeluarkan *Chinese's dream* sebagai impian Xi Jinping yang ingin terus maju dengan upaya yang gigih dan terus mendorong tujuan besar sosialisme dengan karakteristik dan berjuang untuk mencapai impian Tiongkok (BBC , 2013).

Konsep *Chinese's dream* mempengaruhi sistem ekonomi dan politik internasional ketika Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Impian Xi Jinping dalam *Chinese's dream* untuk kebangkitan kembali Tiongkok sebagai kekuatan besar yang muncul kembali atau mengembalikan pembaruan bangsa Tiongkok. dalam merealisasikan *Chinese's dream*-nya Xi Jinping juga membuat perjanjian asing seperti kunjungan ke India untuk kepentingan agenda politik

(Mohanty, 2013). Untuk mewujudkan kekuatan ekonominya Tiongkok mendukung perluasan perdagangan bahan bakar fosil berkelanjutan dan memenuhi tujuan global yang ditetapkan *Paris Agreement* hingga skenario di mana Tiongkok menjadi penyedia infrastruktur teknologi tinggi yang baik hati yang memberdayakan dunia yang dibatasi karbon. Tiongkok dalam hubungan multilateral dan bilateralnya yang baru berkembang baik dapat diharapkan untuk mempertahankan kerja sama iklim yang aktif dan menguntungkan untuk tujuan teknologi, ekonomi, dan kekuatannya. Retorika baru yang berasal dari pemimpin Tiongkok tentang perubahan iklim sangatlah penting. Dalam masa jabatan Xi Jinping, retorika ini telah dikombinasikan dengan pendorong ekonomi domestik, politik, dan sosial dari transisi rendah karbon. Tiongkok dapat menerapkan transisi energi domestik dan penghentian penggunaan baru bara dan kebijakan Xi Jinping dalam menghidupkan kebijakan BRI-nya (Geall, 2017).

Ketika Xi Jinping mengambil peran dalam pembangunan hijau BRI-nya yang merupakan bagian dari *soft power push* Tiongkok mengambil peran dalam masalah iklim internasional. Xi Jinping mengatakan dalam *Belt and Road* forum pada tahun 2017 untuk bertekad melindungi bumi ini dari degradasi melalui tindakan segera terhadap perubahan iklim dan mendorong semua pihak yang telah meratifikasinya untuk sepenuhnya menerapkan *Paris Agreement*, dan mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, melestarikan dan menggunakan lautan secara berkelanjutan, dan laut, sumber daya air tawar, serta hutan, pegunungan, dan lahan kering, melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan satwa liar, serta

memerangi penggurunan dan degradasi lahan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensinya secara seimbang dan terintegrasi (Geall, 2017).

Berkenaan dengan komitmen Tiongkok untuk memerangi perubahan iklim, Xi Jinping mengatakan ekonomi terbesar kedua di dunia itu memiliki kepercayaan diri dan tekad dalam menjalankannya. Xi Jinping juga menekankan akan terus memajukan kerja sama internasionalnya mengenai perubahan iklim dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakannya. Hal ini ditunjukkan Xi Jinping sebagai bentuk ambisinya untuk bertahan dalam *Paris Agreement*, dan memperlihatkan kepada dunia bahwa keseriusan Tiongkok dalam mengatasi perubahan iklim telah dijalankan. Tiongkok siap mengambil peran pentingnya dalam mencapai kesepakatan pada masalah-masalah lingkungan. Tekad Xi Jinping dalam menangani perubahan iklim juga sebagai tujuan Xi Jinping untuk mewujudkan *Chinese dream*-nya dalam kebijakan domestik, pembangunan kapasitas dan struktur ekonomi, serta mencatat kebutuhan yang negara untuk meningkatkan standar hidup rakyat mereka walaupun perubahan iklim sedang ditangani. Pernyataan Xi Jinping ini menunjukkan tekadnya dalam menangani perubahan iklim sekaligus mewujudkan tujuan negaranya (Xinhua, 2015).

Tabel 1.1

Goals and Objectives	Alternatives	Consequences		Choice
		Cost	Benefit	
<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai promosi aktif Tiongkok dalam mempromosikan pertumbuhan hijau dan rendah karbon. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiongkok memutuskan melakukan kerjasama dengan india untuk mempromosikan energi terbarukan dengan mengembang energi baru melalui tenaga surya dan angin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiongkok menawarkan USD 3,1 miliar untuk dana energi terbarukan dan menyediakan ganti rugi untuk pembiayaan jangka panjang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeksplorasi teknologi rendah karbon yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh cepat. 	Pilihan Xi Jinping dalam rekonstruksi pembangunan hijau BRI sebagai bentuk <i>soft power push</i> dalam masalah iklim internasional untuk mewujudkan <i>Chinese dream</i> dalam bertahan di perjanjian iklim global yang ditentukan oleh motif ekonomi dan lingkungan.
<ul style="list-style-type: none"> - Kepentingan Tiongkok dalam ekonomoi solusi iklim sebagai kepentingan Tiongkok untuk memulai transisi ke ekonomi rendah karbon. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiongkok memutuskan bekerjasama dengan Uni Eropa untuk mengembangkan teknologi batu bara bersih dan mengembangkan solar PV tenaga surya sebagai pembangkit listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek CDM dengan investasi 2,3 juta euro sehingga hubungan semakin ditentukan oleh ekonomi dan perdagangan energi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keuntungan ekonomi Tiongkok tumbuh 50% 	
<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menyeimbangkan sumber daya penyerap emisi gas rumah kaca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiongkok juga memutuskan bekerjasama dengan Brazil untuk penanggulangan perubahan iklim dan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek bidang energi terbarukan yang memiliki potensi menghasilkan 1,3 triliun, tetapi proyek ini belum seutuhnya berjalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan yang memajukan ekonomi dan komitmen lingkungan hijau bagi Tiongkok. 	

<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memperlihatkan komitmen Tiongkok secara diplomasi pada perubahan iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pembangunan hijau dalam kebijakan <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) dengan Kementerian Lingkungan PBB 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada kepentingan Xi Jinping di BRI dalam pembangunan hijau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan berkelanjutan melalui jalur sutra untuk mempromosikan pengembangan kemitraan BRI 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiongkok dalam <i>Paris Agreement</i> untuk mengatasi emisi gas karbon di negaranya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiongkok perlu meningkatkan investasi dalam penyimpanan energi untuk mengurangi permintaan industri. Tetapi hal tersebut sudah dilakukan Tiongkok dengan melakukan investasi solar PV untuk pembangkit listrik menggunakan tenaga surya. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Paris Agreement</i> dapat mewujudkan INDC Tiongkok dalam mengatasi emisi gas karbon dan sekaligus untuk melakukan pembangunan hijau Tiongkok dalam pengembangan alternatif energi terbarukan. 	

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori kebijakan luar negeri Graham Allison yang berfokus pada model rasional aktor, alasan Tiongkok bertahan dalam *Paris Agreement* sebagai kepentingan Xi Jinping dalam mewujudkan *Chinese dream* dengan melakukan upayanya di *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi gas karbon. Sebagai pemimpin negara, Xi Jinping berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan yang lebih kuat untuk mencapai emisi CO₂ Tiongkok sebelum 2030 dan akan mencapai netralitas karbon. Sejalan dengan tujuan Xi Jinping melalui *Paris Agreement*, Tiongkok dapat terlihat berupaya dengan dunia konferensi iklim PBB dan menggunakan jalan ini sebagai kesempatan dan peluang yang sejalan dengan kepentingan domestiknya sekaligus meningkatkan ekonomi, mengatasi emisi karbon dan menopang ketahanan energi.

Untuk mengatasi emisi gas karbon, Tiongkok juga melakukan beberapa alternatif dengan beberapa kerja sama dengan negara lain. Tiongkok bekerja sama dengan India dengan meningkatkan energi terbarukan untuk memenuhi target iklim mereka di bawah 2 derajat celcius. Kedua negara ini juga memutuskan untuk menggunakan batu bara bersih melalui pembangkit listrik tenaga matahari. Dengan menggunakan energi terbarukan yang lebih besar Tiongkok dan India dapat meningkatkan penghematan energi di seluruh sistem ekonomi mereka dan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk menurunkan emisi. Tiongkok juga melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dalam mengatasi

perubahan iklim dengan kota rendah karbon. Sejumlah kota di Tiongkok bermitra dengan kota-kota negara anggota Uni Eropa untuk mempromosikan pertukaran kebijakan, perencanaan dan praktik baik itu untuk rendah karbon, pembangunan dan ketahanan iklim. Uni Eropa juga ikut beradaptasi dalam proyek kota ramah lingkungan rendah karbon di Tiongkok. Tiongkok juga bekerja sama dengan Brazil dengan melakukan ketahanan pangan dan energi, kualitas hidup di kota, sanitasi, infrastruktur berkelanjutan, transportasi, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Xi Jinping kemudian membangun platform internasional untuk bertukar ide, kebijakan dan praktik pembangunan hijau dengan membentuk koalisi internasional dalam kebijakan BRI dengan mempromosikan kemajuan ekologi dalam bentuk investasi dan perdagangan untuk melestarikan lingkungan hijau, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengatasi perubahan iklim. Pembangunan hijau ini dilakukan melalui kerja sama Kementerian ekologi dan lingkungan Tiongkok dengan Kementerian lingkungan PBB. Tiongkok melakukan pembangunan berkelanjutan dengan membangun jalur sutra sesuai dengan tren pembangunan hijau internasional dan konsisten pada agenda 2030 di *Paris Agreement*. Strategi pembangunan hijau Tiongkok di BRI ini merupakan strategi yang paling efektif untuk Tiongkok dalam menjalankan kepentingannya. Karena dalam strategi ini juga terdapat target Tiongkok yang dimasukkan ke dalam target penurunan emisi INDC yang Tiongkok ajukan.

Melalui berbagai macam strategi alternatif Tiongkok dalam mengurangi emisi gas karbon dan permasalahan lingkungan negaranya terlihat

upaya dan ambisi Tiongkok dalam mempertahankan *Paris Agreement*. Tekad Xi Jinping dalam menangani perubahan iklim juga sebagai tujuan untuk mewujudkan *Chinese dream*-nya dalam kebijakan domestik pembangunan kapasitas dan struktur ekonomi serta untuk kebutuhan negara dan meningkatkan standar hidup rakyat mereka sekaligus mengatasi perubahan iklim. Melalui *Chinese dream* Xi Jinping akan terus mengembangkan ekonomi Tiongkok dengan menggunakan energi terbarukan dan pengurangan teknologi untuk industri padat energi.

4.2 Rekomendasi

Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak adanya kapan waktu dimulai dan batas waktu untuk menganalisis alasan Tiongkok bertahan dalam Paris Agreement. Penulis hanya fokus pada tahun dimana dimulainya Tiongkok bergabung dan meratifikasi Paris Agreement, dan target Tiongkok sampai tahun 2030. Penulis memasukkan Tahun 2017, karena pada tahun tersebut emisi gas karbon Tiongkok masih tinggi dan pada tahun itu juga Amerika Serikat sebagai negara penyumbang emisi gas karbon di dunia setelah Tiongkok memutuskan untuk menarik diri dari Paris Agreement. Kekurangan Penelitian ini juga terletak pada tidak adanya data yang spesifik mengenai emisi yang disebabkan di Tiongkok per Provinsinya, karena tiap wilayah di Tiongkok penyebab emisi yang ditimbulkan juga berbeda. Saran untuk penulis selanjutnya untuk bisa memasukkan data yang lebih spesifik mengenai emisi yang disebabkan di tiap wilayah di Tiongkok dan menambahkan tantangan yang di hadapi Tiongkok sebagai negara berkembang yang sedang mendorong pembangunan ekonomi

yang bergantung pada industri besar dan kebutuhan energi yang semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Asia News Monitor . (2016). *China: China Ratifies Paris Climate Agreement*. Bangkok: Asia News Monitor.
- Balasubramanian, M., & Birundha, V. D. (2012). Climate Change and its Impact on India. 1-17.
- BBC . (2013). *What does Xi Jinping's China Dream mean?* China: bbc.com.
- BBC NEWS. (2017, May 9). *Climate Change: China vows to Defand Paris Agreement*. Retrieved from Climate Change bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-39861589>
- Bendor, J., & Hammond, H. T. (1992). Rethinking Allison's Model. *American Political Science Review*, 1-24.
- Bharadwaj, T. (2017). Energy Security and Climate Change: Prospects for Cooperation between India and China. *Researcher, China Research Programme, IPCS*, 22-36.
- Boudon, R. (1988). Limitations of Rational Choice Theory. *American Journal of Sociology*, 817-828.
- Carter, N. (2007). *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CCICED. (2018). *Special Policy Study on Green Belt and Road and 2030 Agenda for Sustainable Development*. Chian: China Council for International Cooperation on Environment and Development.
- Chen, S. (2017). Theories of Foreign Policy and International Relations. *E-International Relations*, 1-6.
- Chotimah , H. C. (2017). Analisis Strategi Keamanan Energi China dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Pendekatan Konstruktivisme. *Jurnal Politik Internasional* , 29-43.
- Clean Energy Wire. (2018, September 03). *EU lifts tariffs on Chinese solar panels / CO2 fills Germany's coffers*. Retrieved from Journalism for the Energy Transition: <https://www.cleanenergywire.org/news/eu-lifts-tariffs-chinese-solar-panels-co2-fills-germanys-coffers>
- Climate Action Tracker . (2020, September 21). *Climate Action Tracker Pladge and Targets China in Paris Agreement*. Retrieved from Climate Action Trackers: <https://climateactiontracker.org/countries/china/pledges-and-targets/>
- de Mesquita, B. F. (2010). Foreign Policy Analysis and Rational Choice Models. *New York University*, 1-29.
- Derwent, H., Btchowicz, A., Hugel, J., Fernando, L., Blanco, Yu Xing, M. L., & Franco, N. M. (2006). *Analysis of the Paris Agreement*. Jstor.
- Energy and the Environment Explained (EIA). (2020, November 5). *Greenhouse gases and the climate*. Retrieved from Energy and the Environment Explained (EIA):

<https://www.eia.gov/energyexplained/energy-and-the-environment/greenhouse-gases-and-the-climate.php>

- European Union. (2005, September 2). *EU and China Partnership on Climate Change* . Retrieved from The EU and China have a long-standing cooperation on climate change and have agreed to further step up joint efforts.: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/cooperation/china_en
- F. Li, A. H. (2016). Hopes of Limiting Global Warming? China and the Paris Agreement on Climate Change. *China Perspectives*, 49-54.
- Fa'iz, F. S. (2018). Keberhasilan Ratifikasi AS-Tiongkok atas Paris Agreement dalam Meningkatkan Legitimasi Rezim Mitigasi Global Climate Change .
- Geall, S. (2017, November 16). *Clear Waters and Green Mountains: Will Xi Jinping Take the Load on Climate Change*. Retrieved from Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/publications/clear-waters-and-green-mountains-will-xi-jinping-take-lead-climate-change>
- Herz, S. (2020, October 5). *Interests, Not Altruism, Drive China's New Climate Ambition*. Retrieved from Siera Club: <https://www.sierraclub.org/articles/2020/10/interests-not-altruism-drive-chinas-new-climate-ambition>
- Hongyuan, Y. (2016). The Paris Climate Agreement and China's Role in Global Climate Governance. *China Quarterly of International Strategic Studies* , 185-200.
- Horowitz, C. A. (2016). Paris Agreement. *International Legal Materials* , 740-755.
- Huaxia. (2020, 12 12). *Full Text: Remarks by Chinese President Xi Jinping at Climate Ambition Summit*. Retrieved from XinhuaNet: http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/12/c_139584803.htm
- Hudson, V. (2005). Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations . *Foreign Policy Analysis* , 1-30.
- Jayaraman, T. (2016). The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis and Implications. *Centre for Science, Technology and Society, School of Habitat Studies, Tata Institute of Social Sciences*, 1-7.
- Ji-Feng, L., Zhong-Yu, M., Ya-Xiong, Z., & Zhi-Chao, W. (2018). Analysis on energy demand and CO2 emissions in China following the Energy Production and Consumption Revolution Strategy and China Dream target. *Advances in Climate Change*, 16-26.
- Jimin, Z. (2005). IMPLEMENTING INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL TREATIES IN DEVELOPING COUNTRIES: CHINA'S COMPLIANCE WITH THE MONTREAL PROTOCOL. *Global Environmental Politics* , 58-85.
- Kafle, T. R. (2011). Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign Policy Analysis. *Journal University of Nicosia*, 1-16.
- LI, A. H. (2016). Hopes of Limiting Global Warming? China and the Paris Agreement on Climate Change. *China Perspectives*, 49-54.
- Liu, L., & Wu, T. (2014). EU-China Relationship in a new Era of Global Climate Governance. *Journal of School Public Administration Sichuan and School of Life Science Arizona*, 1-16.

- McBeath, J., & Wang, B. (2008). China's Environmental Diplomacy. *American Association for Chinese Studies*, 1-16.
- Mohajan, H. K. (2014). Greenhouse Gas Emission of China. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 190-202.
- Mohanty, M. (2013). Xi Jinping and the 'Chinese Dream'. *Economic and Political Weekly*, 34-40.
- Purbo, A., Wibowo, A., Tobing, L. B., & dkk. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Natinally Determined Contribution*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
- Rinayuhani, T. R. (2017). Rational Choice Dalam Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan PT.Freeport Indonesia. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 1920-1927.
- Rudd, K. (2020, December 11). *The new geopolitics of China's climate leadership*. Retrieved from China Dialogue: <https://chinadialogue.net/en/climate/the-new-geopolitics-of-chinas-climate-leadership/>
- Sha, F., Ji, Z., Linwei, L., & NCSC. (2105). an Analysis of China's INDC . *International Center for Climate Governance*, 1-12.
- Siddiqi, T. (2011). China and India: More Cooperation Than Competition in Energy and Climate Change. *Journal of International Affairs*, 73-90.
- Smith, S. (1986). Theories of Foreign Policy: An Historical Overview. *Cambridge University Press*, 13-29.
- Sorensen, C. T. (2015). he Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: from "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei". *JCIR*, 53-73.
- Streck, C., Keenlyside, P., & Unger, M. v. (2016). The Paris Agreement : A New Beginning. *Journal of European Environmental & Planning Law*, 3-29.
- Studart, R., & Myers, M. (2017). Reimagining China-Brazil Relations Under the BRI: The Climate Imperative. *Brazilian Center for International Relations*, 1-10.
- Swaine, D. M. (2020). Chinese Attitudes toward the US Withdrawal from the Paris Climate Accord. *China Leadership Monitor*, 1-13.
- Talia, Y. (2020, Juli 29). *European Green Deal: Pertarung Krisis Lingkungan Eropa*. Retrieved from osc medcom: <https://osc.medcom.id/community/european-green-deal-petarung-krisis-lingkungan-eropa-1145>
- Teixeira, I. (2019, January 9). *an Environmental Agenda for Brazil and China*. Retrieved from Dialogo Chino: <https://dialogochino.net/en/climate-energy/18534-an-environmental-agenda-for-brazil-and-china/>
- UNDP. (2019). *Climate Change Adaption Brazil* . Retrieved from UNDP Climate Change Adaption: <https://www.adaptation-undp.org/explore/latin-america-and-caribbean/brazil>
- United Nations Climate Change. (2017, April 21). *China and India Lead Global Renewable Energy Transition*. Retrieved from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/news/china-and-india-lead-global-renewable-energy-transition>

- United Nations Climate Change. (2017, November 27). *South-South Climate Cooperation Strengthened at COP23*. Retrieved from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/news/south-south-climate-cooperation-strengthened-at-cop23>
- United Nations Climate Change. (2018, Juli 17). *China, EU Reaffirm Strong Commitment to Paris Agreement*. Retrieved from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/news/china-eu-reaffirm-strong-commitment-to-paris-agreement>
- United States Environmental Protection Agency (EPA). (2019, March 19). *What are the trends in greenhouse gas emissions and concentrations and their impacts on human health and the environment?* Retrieved from United States Environmental Protection Agency (EPA): <https://www.epa.gov/report-environment/greenhouse-gases>
- Wehrmann, B. (2016, September 03). *EU lifts tariffs on Chinese solar panels / CO2 fills Germany's coffers*. Retrieved from PV magazine: <https://www.pv-magazine.com/>
- Xiangyang, D., & Guiqiu, Y. (2011). China's Greenhouse Gas Emissions Dynamic Effect in the Process of its Urbanization: a Perspective from Shocks Decompositin Under Long-Term Constraints. *Energy Procedia*, 1660-1665.
- Xinhua. (2015). *Xi Sends Strong Signals at Paris Climate Talks*. China: China Daily.
- Yun, G. (2016). China's Response to Climate Change Issues After Paris Climate Change Conference . *Advancing Research Evolving Science*, 235-240.
- Zhang , Z. X. (2007). China, the United States and Technology Cooperation on Climate Control . *Environmental, Science and Policy*, 622-628.
- Zhang, H. B., Dai, H. C., Lai, H. X., & Wang, W. T. (2017). US Withdrawal from the Paris Agreement: Reason, Impact, and China's Response . *Advances in Climate Change Research*, 220-225.
- Zhang, Z. (2016). Are China's Climate Commitments in a Post Paris Agreement Sufficiently ambitious? *Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)*, 1-25.